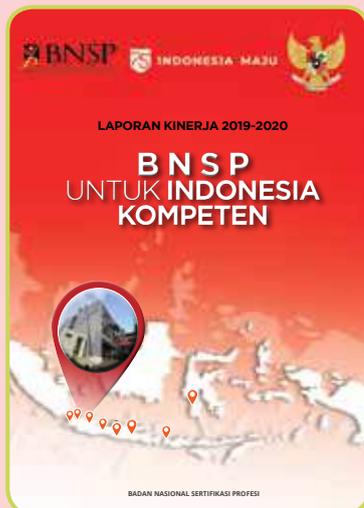


**LAPORAN KINERJA 2019-2020**

# **BNSP UNTUK INDONESIA KOMPETEN**







## KOMPETENSI BARU DI ERA BARU YANG KOMPETITIF

*"Di era yang semakin kompetitif, insan Indonesia harus punya kompetensi-kompetensi baru." (Presiden RI Joko Widodo)*

Pernyataan Presiden Jokowi itu tegas disampaikan beliau dalam sebuah sambutan acara terkait Sertifikasi Profesi di Surabaya, Februari 2020. Sebagai otoritas yang menjamin pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selalu mengawal perjalanan Sertifikasi di Indonesia. Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, BNSP merespon kepedulian tinggi Presiden Jokowi perihal kompetensi dengan melakukan percepatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional.

Sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional yang dikembangkan oleh suatu negara, kalau diyakini kebenarannya dan disiplin serta konsisten pelaksanaannya, akan bermuara pada kemanfaatan dan keterukuran hasilnya serta ketelusuran prosesnya.

Untuk memastikan produk dan jasa yang dihasilkan berkualitas dan kompetitif, dibutuhkan SDM kompeten yang akan membuat inovasi-inovasi, sehingga memberi nilai tambah terhadap barang dan jasa tersebut. Para pelaku di bidang itu memerlukan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pengalaman, unjuk kerja dan kreatifitas. Manfaatnya, untuk mendapatkan *"trust"* serta *"confidence"* dari masyarakat penggunaanya.

Karena itu selama tahun 2019, BNSP telah melakukan berbagai kegiatan sertifikasi, lisensi, harmonisasi, rekognisi, pengembangan sistem data dan informasi, perancangan *e-Office* dan pengembangan SDM. Kami juga melakukan harmonisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar SDM Indonesia memiliki kompetensi-kompetensi baru untuk dapat melompat lebih tinggi lagi dan menjadikan Indonesia unggul.

Kami meyakini prinsip ini, siapa yang menguasai kompetensi akan menguasai masa depan. Kuasai Kompetensi untuk Indonesia Maju. BNSP untuk Indonesia Kompeten.

Jakarta, Juli 2020

**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

Ketua,

**KUNJUNG MASEHAT**



## DAFTAR ISI

Halaman		Halaman	
3	<b>Kata Pengantar</b>	64 - 65	<b>BAB 6. DUKUNGAN ANGGARAN BNSP 2019 &amp; 2020</b>
4	<b>Daftar Isi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Target dan Realisasi anggaran APBN BNSP tahun 2019</li> <li>b. Target dan Realisasi anggaran APBN BNSP tahun 2020</li> </ul>
8	<b>Pendahuluan</b>		
12	<b>BAB 1. PROFIL BNSP</b>	68 - 76	<b>BAB 7. BNSP DI MASA PANDEMI COVID-19</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan BNSP</li> <li>b. Tugas , Fungsi dan organisasi BNSP</li> <li>c. Struktur Organisasi BNSP</li> <li>d. Jenis Pelayanan BNSP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja di Bidang Penjaminan Mutu</li> <li>b. Kinerja Lisensi di masa Pandemi Covid 19</li> <li>c. Kinerja Sertifikasi di masa Pandemi Covid 19</li> <li>d. Kinerja Datin di masa Pandemi Covid 19</li> </ul>
20 - 47	<b>BAB 2. PERAN BNSP DALAM SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL</b>	80	<b>BAB 8. PENUTUP</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KinerjaBidang Lisensi</li> <li>b. Kinerja Bidang Sertifikasi</li> <li>c. Kinerja di Bidang Penjaminan Mutu</li> <li>d. Kinerja Bidang Data, Informasi dan Komunikasi</li> </ul>	82 - 90	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>
50 - 52	<b>BAB 3. PERAN BNSP DALAM SEKTOR STRATEGIS NASIONAL</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran BNSP dalam isu strategis khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI)</li> <li>b. Peran BNSP di Sektor Pariwisata</li> <li>c. Peran BNSP di Sektor Kesehatan</li> <li>d. Peran BNSP di Sektor Pertanian</li> <li>e. Peran BNSP di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</li> </ul>		
56 - 60	<b>BAB 4. HARMONISASI SERTA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harmonisasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</li> <li>b. Harmonisasi Sertifikasi Dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi/Politeknik</li> <li>c. Upaya Harmonisasi</li> </ul>		







# BAB 1



## PENDAHULUAN



## PENDAHULUAN



Kebutuhan akan keunggulan kompetitif di berbagai sektor strategis secara historis merupakan pendorong untuk pengembangan mekanisme baru yang lebih canggih dan cerdas serta hemat biaya dalam proses produksi dan penyediaan jasa. Dalam hal ini, dari waktu ke waktu lompatan tren teknologi terjadi dan merevolusi konsep produksi dan penyediaan jasa, hal ini yang disebut sebagai revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi di bidang mekanisasi dan mesin uap, revolusi industri kedua didasarkan pada penggunaan intensif energi listrik dan produksi massal, dan revolusi industri ketiga didirikan di lingkungan IT dan meluasnya domain digitalisasi.

Saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0 yang secara fundamental akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Sejarah revolusi industri merupakan catatan dimana teknologi yang berkembang dari ditemukannya mesin uap hingga sekarang kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang merubah gaya kehidupan manusia sehari-hari. Revolusi Industri 4.0 memiliki potensi untuk menciptakan pekerjaan baru sekaligus menghilangkan pekerjaan yang sudah ada. Dalam bidang ketenagakerjaan revolusi industri mempunyai pengaruh yang sangat besar, beberapa pekerjaan sudah hilang dan digantikan oleh tenaga pintar yang *artificial intelligence/AI*.

Kondisi ketenagakerjaan saat ini perlu menjadi perhatian bersama sebab disamping Revolusi Industri 4.0 yang memaksa penyesuaian pekerjaan, ada kesepakatan antar negara ASEAN yang memberlakukan sistem ekonomi yang disebut ASEAN Economic Community atau MEA yang berdampak ke hampir semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor perdagangan, pariwisata, manufaktur, dan sebagainya. Imbas dari pasar bebas antar negara di Asia Tenggara tersebut adalah terbentuknya iklim persaingan yang semakin ketat. Di tingkat persaingan kerja, negara yang memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul bisa lebih mudah memenangkan persaingan. Sementara negara yang memiliki sumber daya manusia yang masih cukup rendah harus berjuang ekstra keras untuk bisa ikut bersaing dalam memenangkan persaingan.

Persaingan produk dan jasa ini membuat MEA secara langsung memberikan dampak terhadap sektor dan profesi tertentu yang telah memiliki perjanjian atau *agreements* yang tertuang dalam ASEAN MRAs. Perjanjian tersebut bakal membuat tenaga profesional di ASEAN harus bisa bersaing dengan kemampuan yang dimiliki. Ada sembilan negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang



harus siap berkompetisi dalam era perdagangan bebas ini. Tidak hanya itu, Ketidakcocokan antara dunia pendidikan dan pekerjaan (*mismatch*) menjadi salah satu hal yang harus dicarikan solusi secara tuntas. Mengingat *mismatch* ini menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan Statistik Tenaga Kerja Agustus 2018, BPS menyatakan tenaga kerja di sektor manufaktur tercatat sebesar 18,25 juta orang. Menariknya, 23,06 persen atau sekitar 4,21 juta pekerja merupakan lulusan SD yang merupakan tingkat dasar dalam jenjang Pendidikan dengan keterampilan rendah. Lulusan SMP menjadi penyumbang terbesar kedua pada industri pengolahan atau manufaktur, komposisinya sebesar 22,8 persen atau sekitar 4,16 juta pekerja. Jika digabung, lulusan SD dan SMP menguasai hampir setengah pangsa tenaga kerja di sektor manufaktur dengan 45,86 persen. Lulusan SMK yang dipersiapkan siap kerja di dunia industri hanya menyumbang 17,31 persen atau 3,16 juta pekerja. Selain itu pada 2020-2030 mendatang, Indonesia diprediksi akan mengalami era bonus demografi. Di saat penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas), dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik). Momentum ini tentu menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah signifikan. Namun di sisi lain, bonus demografi dapat menjadi bencana apabila tidak dipersiapkan dengan baik.

Untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut, peningkatan kualitas SDM tentu menjadi hal yang sangat penting. Sebab jumlah angkatan kerja yang tinggi, akan membuat kompetisi dalam pencarian kerja akan meningkat pula. Jika ketersediaan lapangan pekerjaan tidak meningkat, maka yang akan terjadi adalah pengangguran yang besar akan terjadi. Pergeseran besar ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan dunia usaha serta dunia industri. Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya percepatan dalam memberikan solusi untuk permasalahan diatas, antara lain dengan memperluas lapangan kerja, melakukan revitalisasi SMK melalui Inpres No 9 tahun 2016, hingga upaya-upaya untuk mengawinkan dunia pendidikan dan dunia industri agar *link and match* dapat tercapai. Sejak tahun 2019 pemerintah telah mencanangkan sebagai tahun peningkatan kualitas SDM agar lahir SDM unggul untuk dapat memajukan Indonesia. Untuk mendapatkan SDM



unggul perlu dipastikan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dapat dibuktikan melalui uji atau asesmen sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi merupakan Produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standard kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Bagi dunia industri sertifikasi kompetensi dapat untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan telah dilakukan oleh SDM yang kompeten. Dan sertifikasi kompetensi dapat memberikan personal *branding* bagi SDM dalam menjalankan pekerjaannya.





# BAB 2



## PROFIL BNSP



## 2.1. PEMBENTUKAN BNSP



Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BNSP dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP resmi berdiri pada bulan Juli 2005. Pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.





## 2.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.
5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
7. PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
8. PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
9. PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Inpres 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang pedoman penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.



## 2.3. TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI BNSP

Perubahan tersebut secara garis besar mengatur perubahan tata kelola organisasi dan perluasan tugas dan fungsi BNSP.

Merujuk ke PP No 10 tahun 2018, pada pasal 3, BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan tugas BNSP menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
2. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
4. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
5. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi;
6. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.





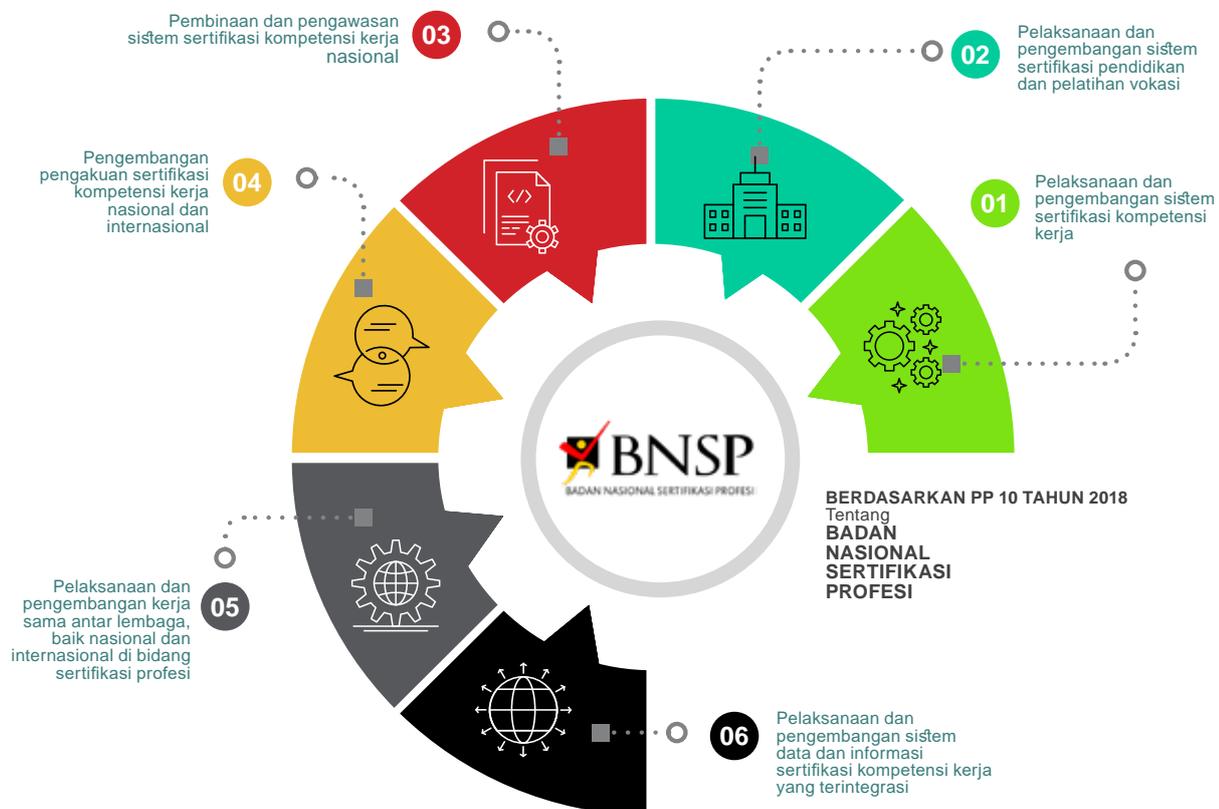
### 2.3. TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI BNSP

Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi maka BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Sesuai PP No 10 tahun 2018, pada pasal 5 dinyatakan bahwa keanggotaan BNSP terdiri dari 7 orang anggota yang meliputi Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota dan 5 orang Anggota. Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua dari unsur masyarakat dan keanggotaan BNSP terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota BNSP periode 2018 – 2023 telah ditetapkan berdasarkan Keppres No 56/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam keanggotaan BNSP.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sekretariat BNSP telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat BNSP, dinyatakan bahwa Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh 4 bagian yaitu: Bagian Perencanaan, Hukum dan Umum, Bagian Sertifikasi, Bagian Lisensi dan Bagian Data dan Informasi. Pembiayaan pelaksanaan tugas BNSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BNSP berkedudukan di Jakarta, dengan alamat kantor Jalan, MT.Haryono, Kav 52, Jakarta Selatan. Alamat *website* adalah [www.bnspp.go.id](http://www.bnspp.go.id) dan telpon (021) 799-2321.

#### TUGAS DAN FUNGSI BNSP MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA





## STRUKTUR ORGANISASI BNSP



**Kunjung Masehat, SH, MM**  
Ketua BNSP



**Miftakul Azis, MH**  
Wakil Ketua BNSP



**Hery Budoyo, ST, MM**  
Kepala Sekretariat BNSP



**Drs. Mulyarto, MM**  
Koordinator Lisensi



**Bonardo Riko Triung, BSB**  
Koordinator Sertifikasi



**Telly Desanti Soemarmo, S.STP, M. Pa**  
Koordinator Jaminan Mutu, Perencanaan,  
Kerjasama, Hukum dan Umum



**Dra. Herry S. Wijayaningrat, M.Si**  
Koordinator Data dan Informasi



**Dra. Muhammad Zubair, M.Si, AIS**  
Koordinator Pengembangan SDM

**KEPALA  
SEKRETARIAT**

**KABAG  
PERENCANAAN,  
HUKUM DAN  
UMUM**

**KABAG LISENSI**

**KABAG  
SERTIFIKASI  
KOMPETENSI**

**KABAG DATA DAN  
INFORMASI**



## 2.4. JENIS PELAYANAN BNSP

### LISENSI

Merupakan bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.



### RELISENSI

Perpanjangan masa aktif LSP yang sudah habis masa berlakunya.



### PENAMBAHAN RUANG LINGKUP (PRL)

Dalam melakukan penambahan ruang lingkup, LSP harus mengajukan permohonan ruang lingkup yg dapat berupa penyesuaian, pengurangan dan atau penambahan skema sertifikasi kompetensi.



### SERTIFIKASI

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.



### DATA INFORMASI

Data Informasi melaksanakan dan mengembangkan program pelayanan publik, pengembangan publikasi, branding dan mengembangkan sistem informasi BNSP.









**PERAN BNSP DALAM  
SISTEM SERTIFIKASI  
KOMPETENSI NASIONAL**



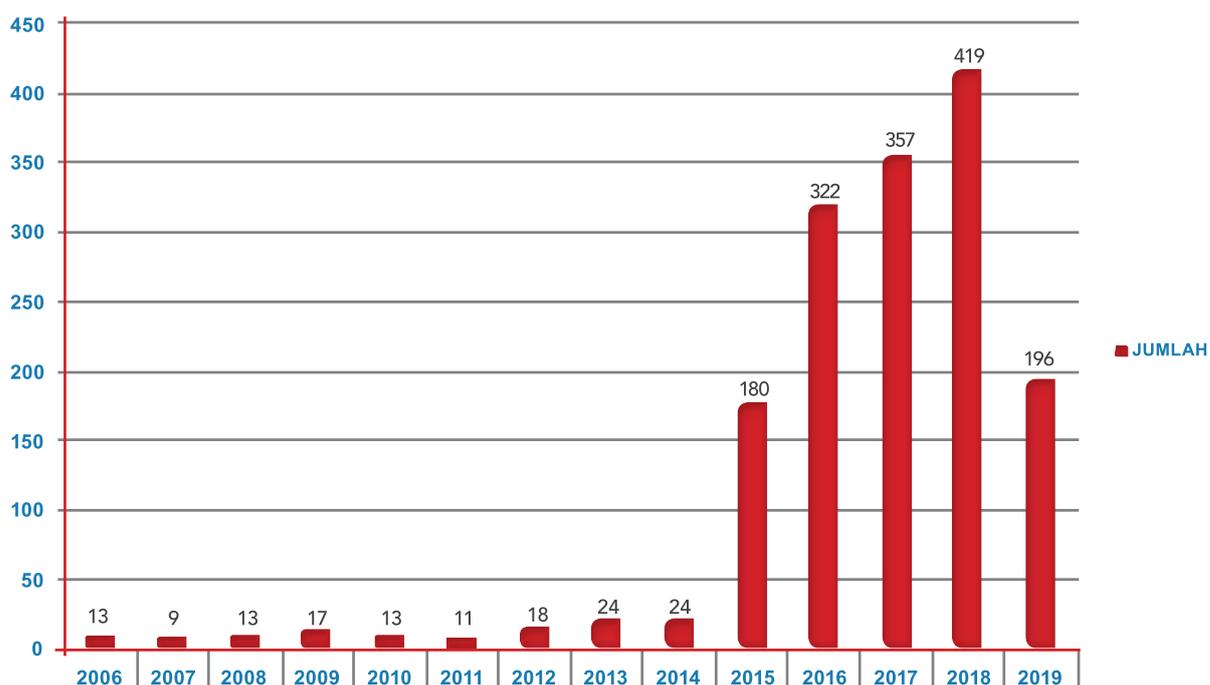
Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan /atau Standar Khusus. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP.

LSP sebagai lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi profesi yang telah mendapat lisensi BNSP merupakan salah satu perangkat atau unsur dalam sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional. Sumber daya yang harus dimiliki dalam sistem sertifikasi kompetensi untuk menjadi LSP adalah memiliki Standar Kompetensi Kerja (SKKNI, SKK khusus terintegrasi, SKK internasional terintegrasi), Asesor Kompetensi, Skema Sertifikasi, Materi Uji Kompetensi (MUK), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).



### 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

DATA LSP SAMPAI TAHUN 2019



JUMLAH KESELURUHAN LSP SAMPAI 31 DESEMBER 2019 : **1616**

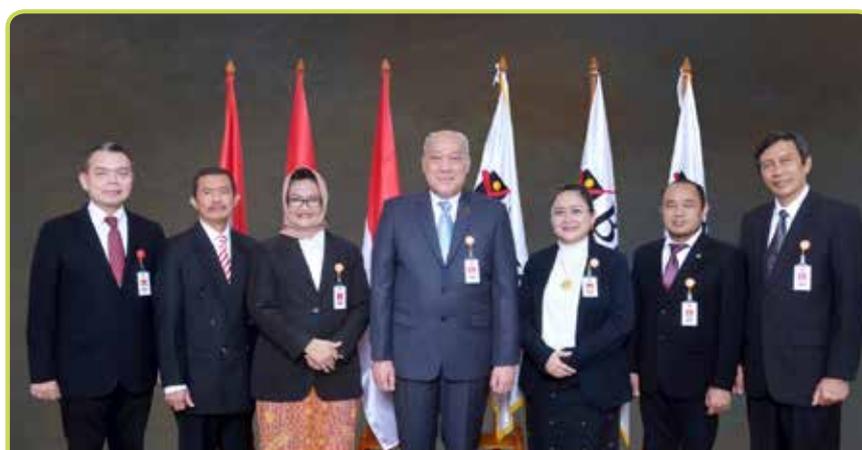


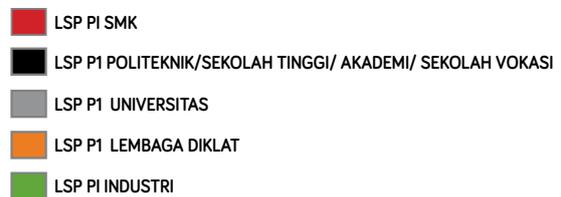
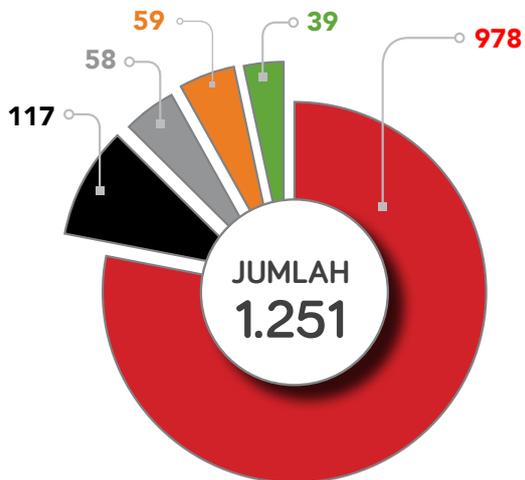
FOTO BERSAMA KETUA BNSP DAN ANGGOTA



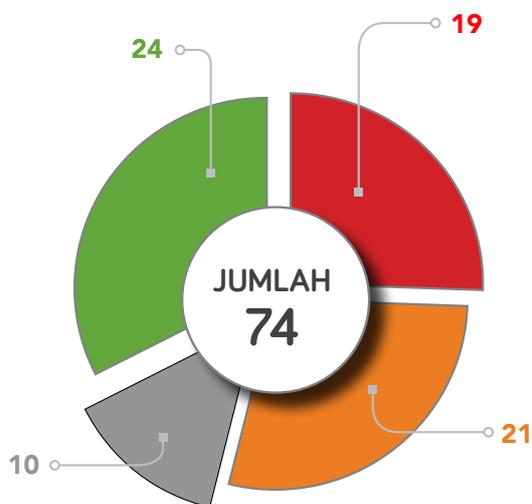
### 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI



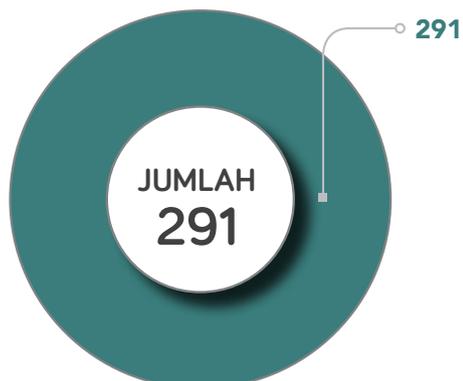
#### DATA LSP 1 S.D. TAHUN 2019



#### DATA LSP 2 S.D. TAHUN 2019



#### DATA LSP 3 S.D. TAHUN 2019



SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019



3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

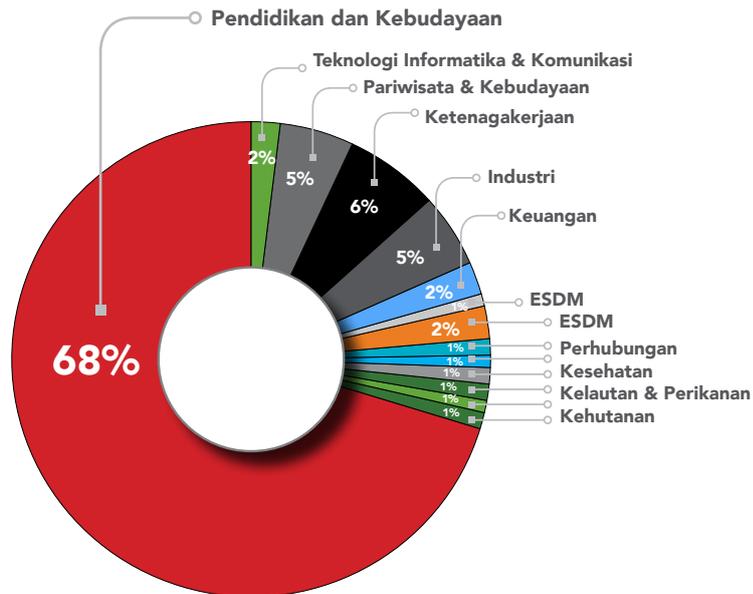
DISTRIBUSI LSP BERDASARKAN KEMENTERIAN/SEKTOR TAHUN 2019

NO	KEMENTERIAN /SEKTOR	2006-2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Teknologi Informatika & Komunikasi	4	5	6	4	8	5	27
2	Pariwisata dan Kebudayaan	29	12	13	11	9	7	74
3	Ketenagakerjaan	21	9	9	32	16	4	87
4	Industri	33	13	15	7	5	5	73
5	Keuangan	14	4	7	5	4	1	34
6	ESDM	8	2	2	4	4	1	20
7	Perhubungan	5	4	6	15	4	1	34
8	Kesehatan	5	3	3	2	2	1	15
9	Kelautan dan Perikanan	1	5	10	1			17
10	Kehutanan	2	1	4	2	1	4	10
11	Perdagangan	2	1	1	4	1	2	9
12	Pekerjaan Umum	3		4	1	1	2	9
13	Pertanian	4	3	4	1		1	12
14	Pendidikan dan Kebudayaan	5	116	236	260	353	160	970
15	Badan Informasi Geospasial	1			2	3		6
16	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	1			1			2
17	POLRI	2				1		3
18	Kementerian Dalam Negeri	1						1
19	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		1					1
20	BPPT				1			1
21	LIPI				1			1
22	Majelis Ulama Indonesia				2			2
23	Kemenkumham			2				2
24	Arsip	1						1
25	Jasa Raharja		1					1
26	Komisi Pemberantasan Korupsi				1		1	1
27	Industri Kreatif					1		1
28	TNI					1		1
29	BAZNAS					1		1
30	PSIKOLOGI					1		1
31	KEWIRAUSAHAAN					1		1
32	PERFILMAN					1		1
33	OLAH RAGA					1		1
34	BADAN NARKOTIKA NASIONAL						1	1
JUMLAH		142	180	322	357	419	196	1616



### 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

## PRESENTASE LSP BERDASARKAN SEKTOR KEMENTERIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019



Persentase LSP terlisensi pada masing-masing sektor seperti terlihat pada Diagram 5. Jumlah LSP menonjol pada tiga sektor, yaitu jasa lainnya pariwisata dan industry manufaktur. Perkembangan LSP pada sektor pariwisata dan industry manufaktur terutama peranan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perindustrian yang sangat intensif dalam membantu pengembangan LSP termasuk pemberian bantuan sertifikasi dan pelatihan asesor. Sedangkan perkembangan pada LSP disektor jasa lainnya didominasi oleh lulusan SMK karena dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Pembinaan SMK yang sangat besar dalam pembentukan LSP P1 SMK. Komisi Lisensi selama periode 2006 sampai 2019 telah memproses pemberian lisensi kepada Lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan BNSP.



3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

**BERIKUT ADALAH SEBARAN LSP TERLISENSI BERDASARKAN PULAU DI INDONESIA:**

**JENIS LSP P1 BERDASARKAN  
PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**



ACEH	: 17	KALIMANTAN SELATAN	: 18	PAPUA	: 7
BALI	: 40	KALIMANTAN TENGAH	: 9	PAPUA BARAT	: 5
BANTEN	: 33	KALIMANTAN TIMUR	: 11	RIAU	: 12
BENGKULU	: 5	KALIMANTAN UTARA	: 2	SULAWESI BARAT	: 7
GORONTALO	: 1	KEP. BANGKA BELITUNG	: 12	SULAWESI SELATAN	: 21
JAKARTA	: 136	KEP. RIAU	: 8	SULAWESI TENGAH	: 4
JAMBI	: 3	LAMPUNG	: 29	SULAWESI TENGGARA	: 0
JAWA BARAT	: 176	MALUKU	: 6	SULAWESI UTARA	: 11
JAWA TENGAH	: 180	MALUKU UTARA	: 3	SUMATERA BARAT	: 38
JAWA TIMUR	: 331	NUSA TENGGARA BARAT	: 12	SUMATERA SELATAN	: 27
KALIMANTAN BARAT	: 10	NUSA TENGGARA TIMUR	: 8	SUMATERA UTARA	: 22
				YOGYAKARTA	: 45

SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019

**JENIS LSP P2 BERDASARKAN  
PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**



ACEH	: 1	KALIMANTAN SELATAN	: 0	PAPUA	: 0
BALI	: 3	KALIMANTAN TENGAH	: 0	PAPUA BARAT	: 1
BANTEN	: 33	KALIMANTAN TIMUR	: 2	RIAU	: 0
BENGKULU	: 12	KALIMANTAN UTARA	: 0	SULAWESI BARAT	: 0
GORONTALO	: 3	KEP. BANGKA BELITUNG	: 0	SULAWESI SELATAN	: 2
JAKARTA	: 33	KEP. RIAU	: 0	SULAWESI TENGAH	: 0
JAMBI	: 0	LAMPUNG	: 0	SULAWESI TENGGARA	: 1
JAWA BARAT	: 12	MALUKU	: 1	SULAWESI UTARA	: 0
JAWA TENGAH	: 3	MALUKU UTARA	: 1	SUMATERA BARAT	: 2
JAWA TIMUR	: 10	NUSA TENGGARA BARAT	: 1	SUMATERA SELATAN	: 0
KALIMANTAN BARAT	: 0	NUSA TENGGARA TIMUR	: 0	SUMATERA UTARA	: 2
				YOGYAKARTA	: 9

SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019



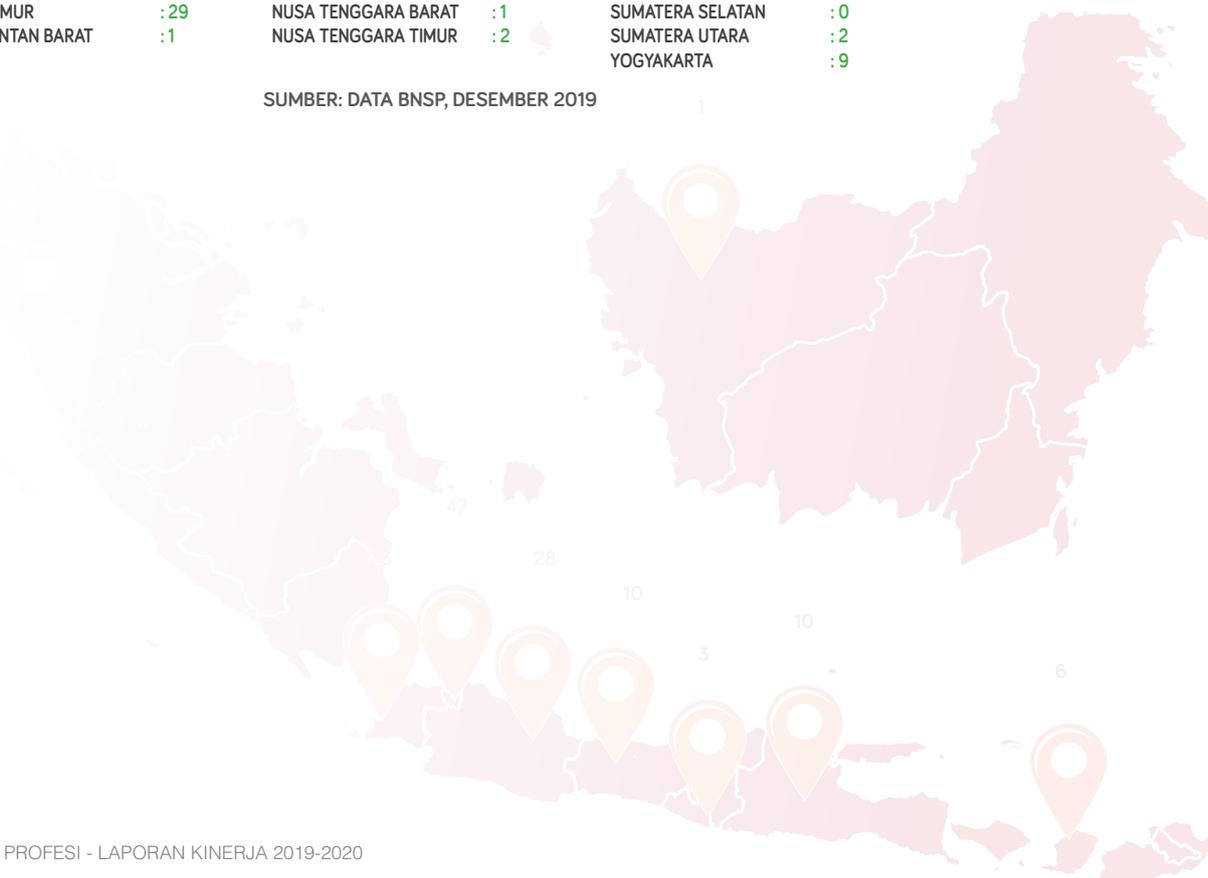
## 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

### JENIS LSP P3 BERDASARKAN PROVINSI S/D TAHUN 2019



ACEH	:1	KALIMANTAN SELATAN	:0	PAPUA	:0
BALI	:13	KALIMANTAN TENGAH	:1	PAPUA BARAT	:0
BANTEN	:8	KALIMANTAN TIMUR	:1	RIAU	:2
BENGKULU	:0	KALIMANTAN UTARA	:0	SULAWESI BARAT	:0
GORONTALO	:0	KEP. BANGKA BELITUNG	:0	SULAWESI SELATAN	:3
JAKARTA	:152	KEP. RIAU	:3	SULAWESI TENGAH	:0
JAMBI	:0	LAMPUNG	:1	SULAWESI TENGGARA	:0
JAWA BARAT	:43	MALUKU	:0	SULAWESI UTARA	:1
JAWA TENGAH	:18	MALUKU UTARA	:0	SUMATERA BARAT	:0
JAWA TIMUR	:29	NUSA TENGGARA BARAT	:1	SUMATERA SELATAN	:0
KALIMANTAN BARAT	:1	NUSA TENGGARA TIMUR	:2	SUMATERA UTARA	:2
				YOGYAKARTA	:9

SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019





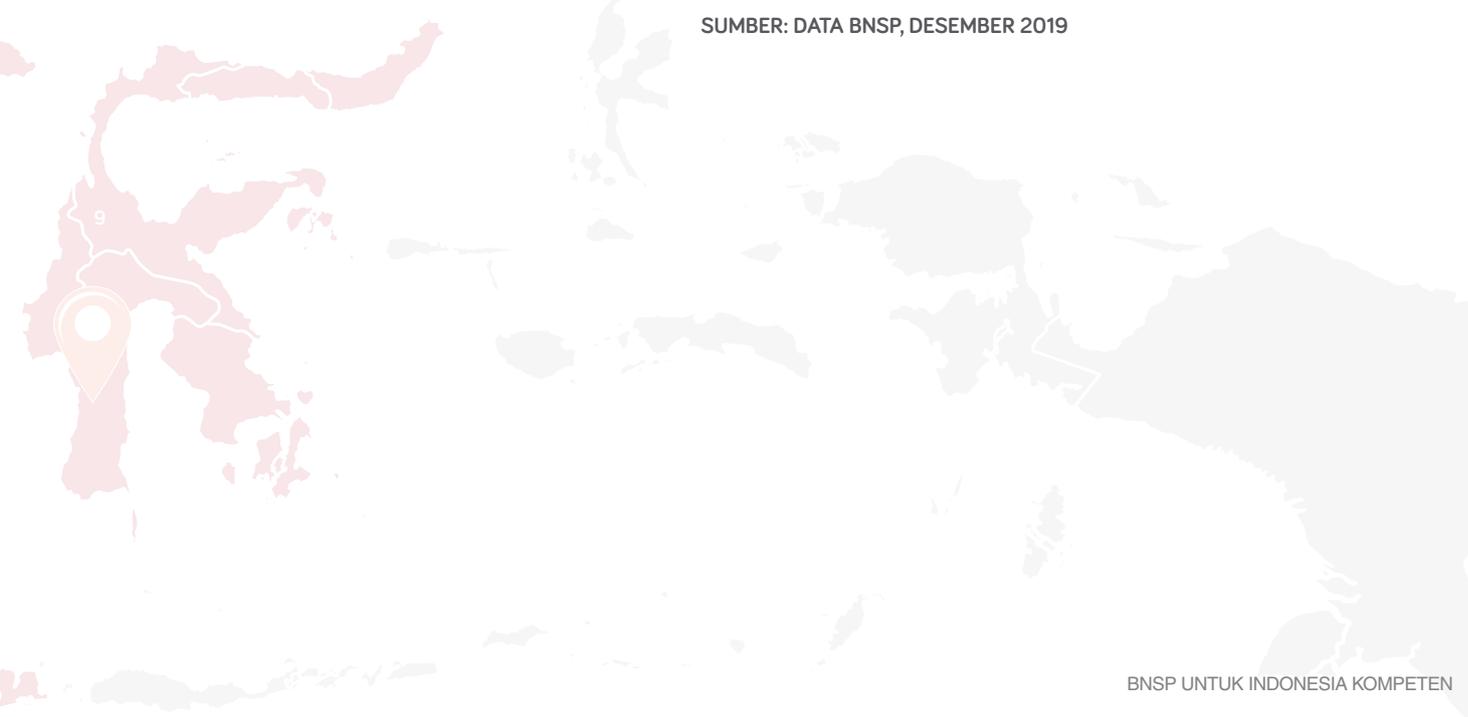
3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

DATA LSP SMK BERDASARKAN WILAYAH S.D. TAHUN 2019



ACEH	:13	KALIMANTAN BARAT	:6	NUSA TENGGARA TIMUR	:7
BALI	:17	KALIMANTAN SELATAN	:15	PAPUA	:4
BANTEN	:25	KALIMANTAN TENGAH	:8	PAPUA BARAT	:3
BENGKULU	:5	KALIMANTAN TIMUR	:6	SULAWESI BARAT	:7
GORONTALO	:1	KALIMANTAN UTARA	:2	SULAWESI TENGAH	:41
JAKARTA	:84	KEP. BANGKA BELITUNG	:10	SULAWESI TENGGARA	:0
JAMBIA	:133	KEP. RIAU	:5	SULAWESI UTARA	:7
KEP. BANGKA BELITUNG	:31	LAMPUNG	:26	SUMATERA BARAT	:31
JAWA BARAT	:133	MALUKU	:3	SUMATERA SELATAN	:21
JAWA TENGAH	:161	MALUKU UTARA	:3	SUMATERA UTARA	:16
JAWA TIMUR	:294	NUSA TENGGARA BARAT	:10	YOGYAKARTA	:28

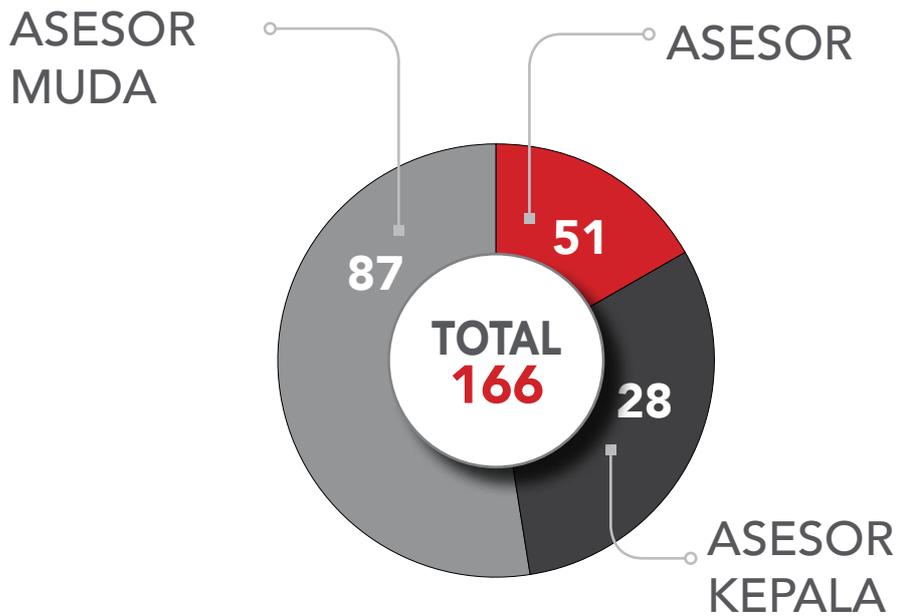
SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019





### 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

#### DATA ASESOR LISENSI BNSP



**ASESOR KEPALA** adalah asesor yang memiliki kualifikasi untuk memimpin pelaksanaan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu, dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

**ASESOR** adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

**ASESOR MUDA** adalah seorang yang mempunyai kualifikasi keahlian/pendidikan dan pelatihan yang sama dengan asesor namun belum mempunyai pengalaman asesmen yang sama dengan asesor.

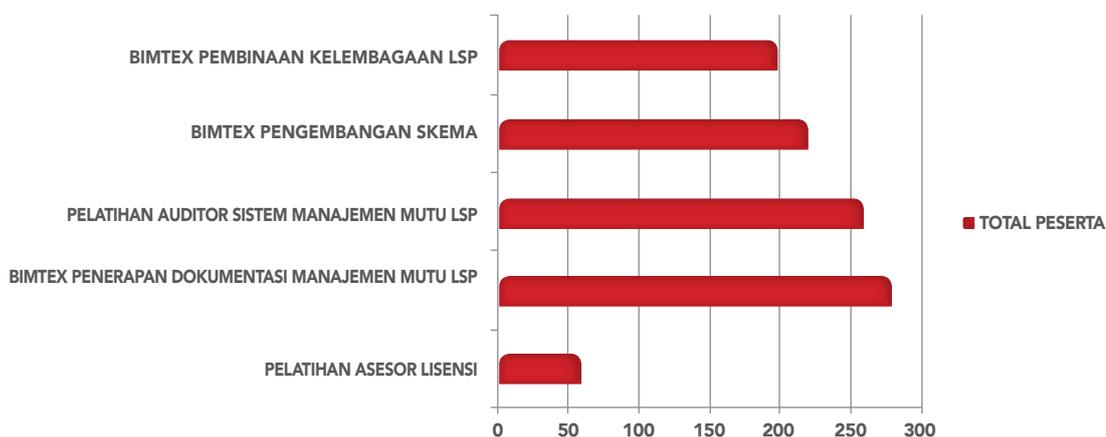
#### DATA PELAKSANAAN PELATIHAN / BIMTEK

NO	NAMA PELATIHAN /BIMTEK	JUMLAH
1	PELATIHAN ASESOR LISENSI	3 ANGKATAN @ 20 ORANG
2	BIMTEK PENERAPAN DOKUMENTASI MANAJEMEN MUTU LSP	14 ANGKATAN @ 20 ORANG
3	PELATIHAN AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU LSP	13 ANGKATAN @ 20 ORANG
4	BIMTEK PENGEMBANGAN SKEMA	11 ANGKATAN @ 20 ORANG
5	BIMTEK PEMBINAAN KELEMBAGAAN LSP	10 ANGKATAN @ 20 ORANG

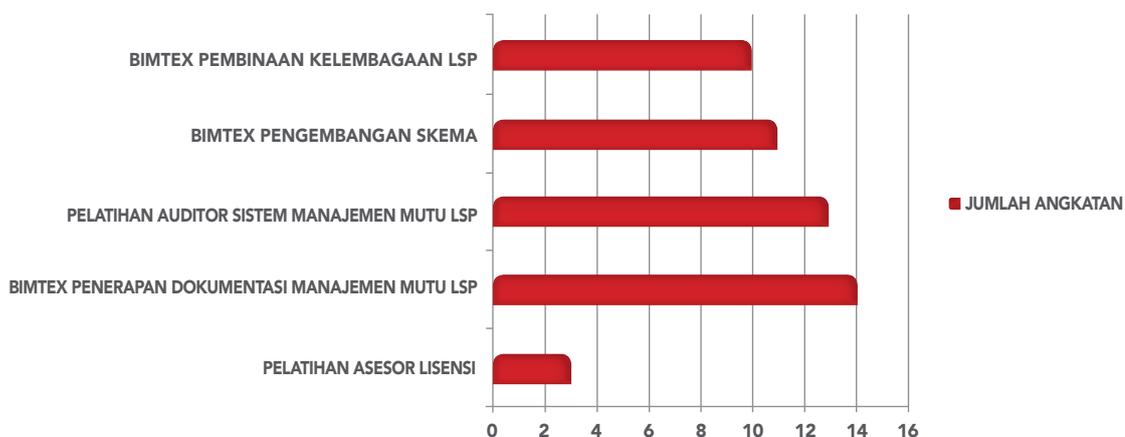


### 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

#### TOTAL PESERTA PELATIHAN/BIMTEX



#### TOTAL ANGKATAN PELATIHAN/BIMTEX



#### **SURVEILEN :**

Surveilen adalah Kegiatan untuk memastikan bahwa Audit kinerja LSP bekerja sesuai dengan pedoman BNSP dan masih dapat memelihara lisensinya

#### **Manfaat Surveilen**

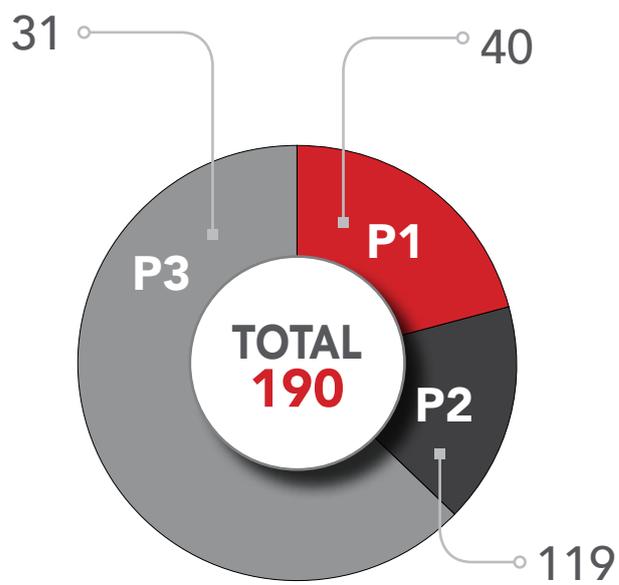
1. Guna memastikan LSP tetap mematuhi ketentuan dan terpelihara pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi yang kredibel dan akuntabel .
2. Memastikan komitmen LSP untuk memenuhi ketentuan pedoman dan kewajiban BNSP . Melalui kegiatan surveilen BNSP melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh LSP dalam kegiatan operasional sertifikasi kompetensi serta gambaran secara menyeluruh kinerja yang dilaksanakan oleh LSP. Surveilen yang dilaksanakan secara periodik yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali sesuai kewajiban yang dituangkan dalam Peraturan BNSP Nomor 3 Tahun 2014 .



### 3.1. KINERJA BIDANG LISENSI

NO	JENIS LSP	JUMLAH
1	P1	40
2	P2	31
3	P3	119
JUMLAH		190

### PELAKSANAAN SURVEILEN





## 3.2. KINERJA BIDANG SERTIFIKASI

### DATA PELATIHAN MASTER ASESOR KOMPETENSI (ASKOM)

#### PELAKSANAAN PELATIHAN ASKOM ANGGARAN MANDIRI

Kegiatan	Jumlah LSP	Jumlah Askom
Pelatihan Asesor Kompetensi	578	10.585

#### PELAKSANAAN PELATIHAN ASKOM ANGGARAN BNSP

No	Tempat Penyelenggaraan	Peserta Askom
1	50 Lokasi	1.000 Orang





### 3.2. KINERJA BIDANG SERTIFIKASI

#### DATA PELATIHAN MASTER ASESOR KOMPETENSI (ASKOM)

Pelatihan Master Asesor Kompetensi diberikan kepada personil bersertifikat kualifikasi master asesor, kompeten bidang tertentu dan diberi tugas untuk melatih asesor kompetensi.

#### PELATIHAN MASTER ASESOR KOMPETENSI BNSP

No	Tempat Penyelenggaraan	Peserta Askom
1	2 Angkatan	40 Orang





### 3.2. KINERJA BIDANG SERTIFIKASI

#### DATA PELAKSANAAN *RECOGNITION CURRENT COMPETENCY* (RCC)

Setelah mengikuti *Recognition Current Competency* (RCC) ini peserta mampu memahami kembali Kebijakan Sistem Sertifikasi Kompetensi, Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen, Memberikan Kontribusi dalam Validasi asesmen, Melaksanakan Asesmen, dan Mengases Kompetensi.

#### PELAKSANAAN *RECOGNITION CURRENT COMPETENCY* (RCC) ANGGARAN MANDIRI

Kegiatan	Jumlah LSP	Jumlah Akom
RCC Asesor Kompetensi	246	4.460

#### PELAKSANAAN *RECOGNITION CURRENT COMPETENCY* RCC ANGGARAN BNSP

No	Tempat Penyelenggaraan	Peserta Askom
1	60 Lokasi	1.200 Orang





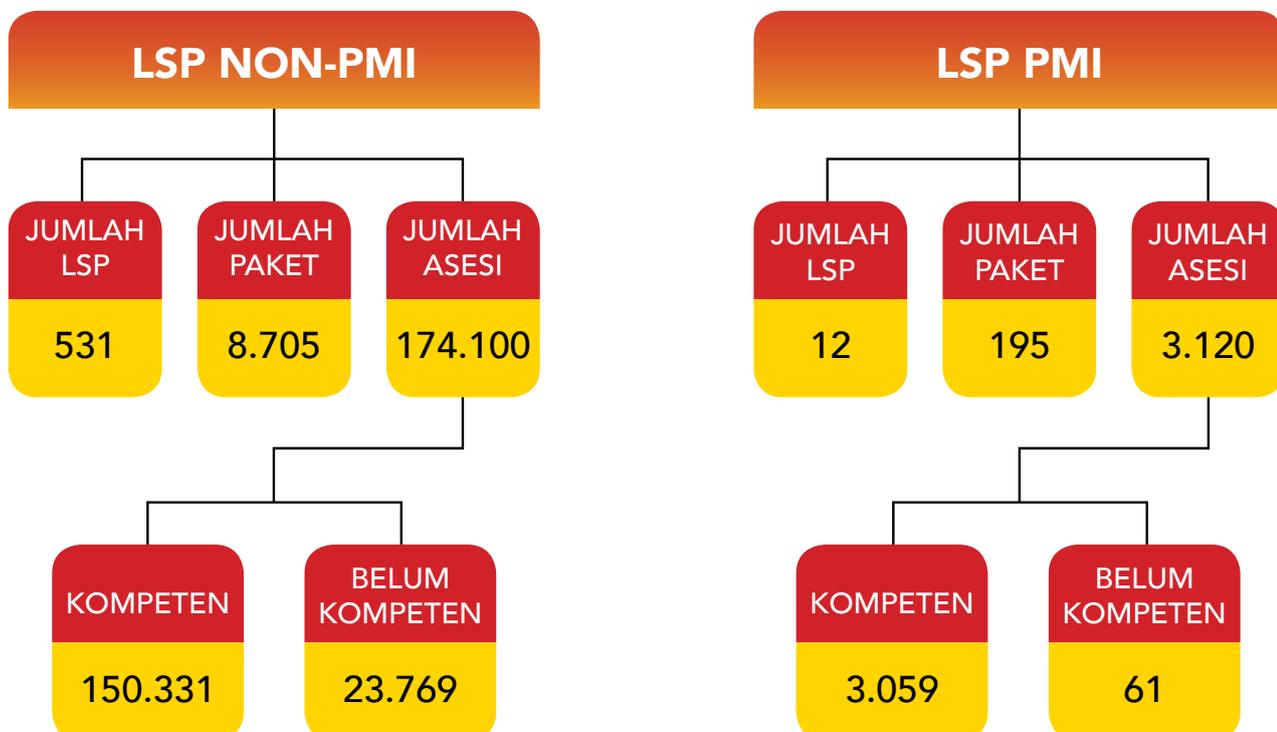
### 3.2. KINERJA BIDANG SERTIFIKASI

#### DATA PROGRAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK)

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) melalui anggaran BNSP antara lain bertujuan untuk :

1. Mempercepat pengakuan industri dan sektor terhadap tenaga kerja bersertifikat kompetensi.
2. Memfasilitasi calon tenaga kerja/tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) oleh LSP.
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) oleh LSP yang berorientasi pada permintaan industri terhadap tenaga kerja kompeten yang memiliki sertifikat kompetensi.
4. Memfasilitasi kerjasama LSP dengan dunia usaha/industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten bersertifikat kompetensi.
5. Sasaran yang hendak dicapai dalam Program PSKK ini adalah terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja migran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan tertelusur dalam rangka percepatan pengakuan sertifikasi kompetensi.

#### LSP PENERIMA PSKK 2019







### 3.2. KINERJA BIDANG SERTIFIKASI

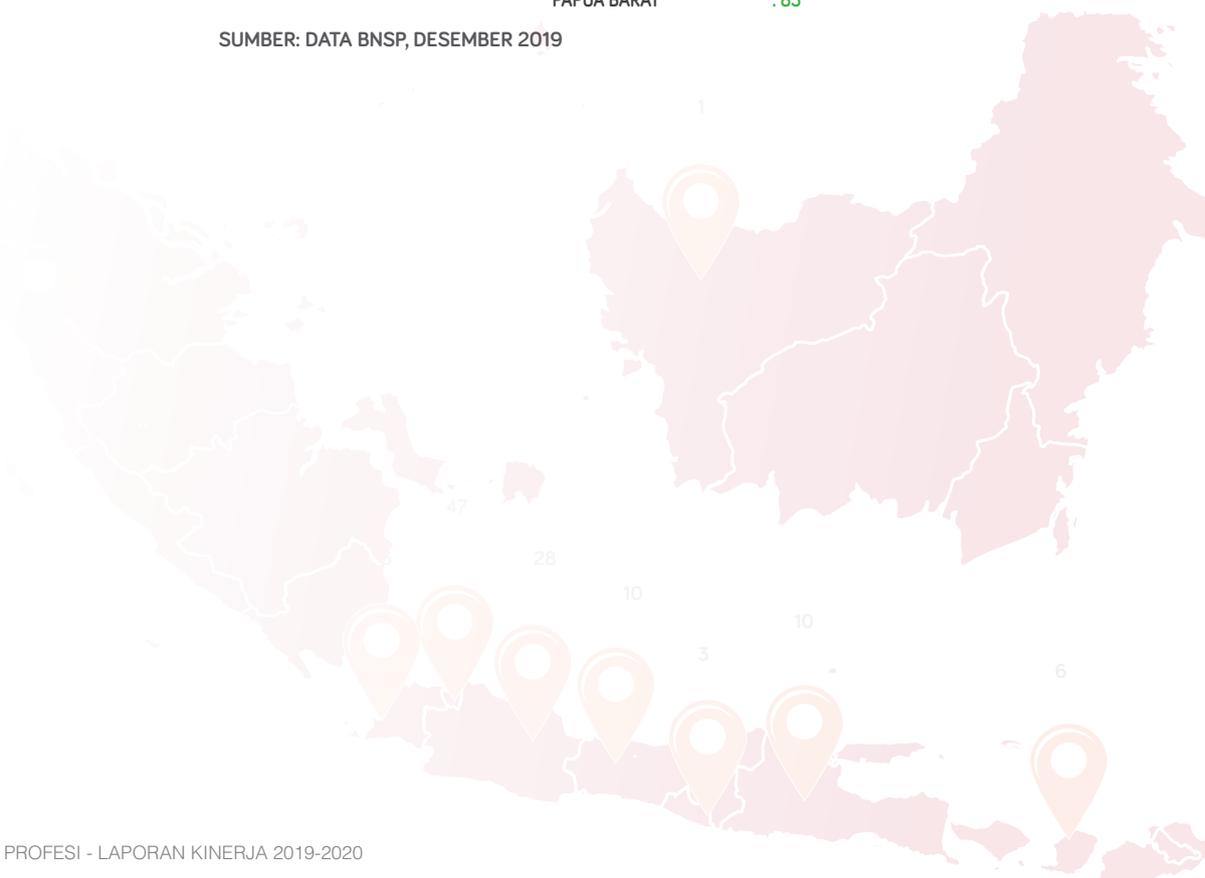
#### SEBARAN ASESOR KOMPETENSI BNSP

## SEBARAN ASESOR



ACEH	:192	DKI JAKARTA	:3844	KALIMANTAN TIMUR	:629
SUMATERA UTARA	:465	JAWA BARAT	:5465	KALIMANTAN SELATAN	:529
SUMATERA BARAT	:891	JAWA TENGAH	:4278	SULAWESI BARAT	:73
RIAU	:327	JAWA TIMUR	:6747	SULAWESI SELATAN	:911
KEPULAUAN RIAU	:196	D.I YOGJAKARTA	:1308	SULAWESI TENGAH	:21
BENGKULU	:89	BALI	:1066	SULAWESI TENGGARA	:27
JAMBI	:22	NUSA TENGGARA BARAT	:201	SULAWESI UTARA	:226
KEP. BANGKA BELITUNG	:154	NUSA TENGGARA TIMUR	:227	GORONTALO	:17
SUMATERA SELATAN	:368	KALIMANTAN BARAT	:245	MALUKU	:136
LAMPUNG	:334	KALIMANTAN UTARA	:16	MALUKU UTARA	:27
BANTEN	:961	KALIMANTAN TENGAH	:121	PAPUA	:234
				PAPUA BARAT	:83

SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019





3.2. KINERJA BIDANG SERTIFIKASI

SEBARAN MASTER ASESOR KOMPETENSI BNSP

SEBARAN MASTER ASESOR



TOTAL: 124 ORANG

SUMBER: DATA BNSP, DESEMBER 2019

ASESI YANG TERSERTIFIKASI BNSP :

SERTIFIKASI BERDASARKAN SEKTOR  
JAN - DES TAHUN 2019

DATA DESEMBER 2019



TOTAL  
911,152

Sumber : Data BNSP, Desember 2019



### 3.3. KINERJA DI BIDANG PENJAMINAN MUTU



Sebagai bidang yang memiliki fungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu dan Kerjasama dalam upaya harmonisasi sistem sertifikasi serta pengakuan sertifikasi di lingkup nasional maupun internasional nasional, pada tahun 2019 pencapaian kinerja pada bidang Penjaminan Mutu meliputi :

1. Jeddah, Arab Saudi, Dalam rangka *3rd Meeting of the Steering Committee of Islamic Conference of Labour Ministers*;
2. Luang Prabang, Lao PDR, Dalam rangka *the Sixth ASEAN Qualifications Reference Framework (AQR) Committee Meeting and National Qualifications Framework (NQF) Phase IV Workshop*;
3. Jenewa, Swiss, Dalam rangka *The 108th Session of the International Labour Convention (ILC ke-108)*;
4. Taipei, Taiwan, Dalam rangka Kunjungan Kerja Tim Peningkatan Keterampilan ke Taiwan;
5. Bangkok, Thailand, Dalam rangka Pertemuan *The Fifteenth Senior Labour Official Meeting (The 15th SLOM)* dan *SLOM+3 ke-17* serta *ASEAN-ILO/Japan Project Cooperation Committee (PCC) Meeting*;
6. Siem Reap, Kamboja, Dalam rangka Pertemuan *ASEAN Meeting 50th ASEAN NTOs Meeting*;
7. Chiang Mai, Thailand, Dalam rangka Pertemuan *the 12th Senior Labour Officials Meeting Working Group on Progressive Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN (12th SLOM WG) and the Related Meetings*;
8. Patra Jasa, Malaysia, Dalam rangka pelaksanaan Rapat Konsultasi untuk Malaysia dan memberikan paparan terkait proyek *"Strengthening the Quality Assurance and Competency Certification Systems through the Application of the ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification"*;
9. Boracay Filipina, Dalam rangka *ATPMC Meeting (Asean Tourism Professional Monitoring Committee)*;
10. Habtoor Palace, LXR Hotels & Resort, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Dalam rangka Pertemuan *Senior Official Meeting (SOM)* dan *5th Abu Dhabi Dialogue Ministerial Consultation*;
11. Busan, Korea Selatan, Dalam rangka Pertemuan *"2019 ASEAN+3 HRD Forum – The Future of Work and Human Resources Development: Innovation in Skills Development in the Era of the 4th Industrial Revolution"*;
12. Wyndham Grand Yangon Hotel, Yangon, Myanmar, Dalam rangka Pertemuan *"The 10th Regional Policy Dialogue on Technical and Vocational Education and Training (TVET)"*;
13. Intercontinental Hotel Doha The City, Qatar, Dalam rangka FGD Strategi Pemagangan dalam menyiapkan Calon PMI Teknisi/Operator di Sektor Migas dan Petrokimia dan Indonesia Expo 2019;
14. Wellington, New Zealand, Dalam rangka undangan dari *Deputy Chief Executive Strategic & Corporate Service New Zealand Qualifications Authority (NZQA)*;



### 3.3. KINERJA DI BIDANG PENJAMINAN MUTU

15. Tokyo, Jepang, Dalam rangka menjadi Narasumber dan menghadiri *The 2nd Meeting of the APO Accreditation Body Council*;
16. Grand Copthorne Waterfront, Singapore, Dalam rangka menghadiri *1st Technical Meeting Committee of 13th ASEAN Skills Competition 2019 (ASC ke- 13)*;
17. Kuala Lumpur, Malaysia, Dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Ketenagakerjaan RI ke Malaysia;
18. Tokyo Jepang, Dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Ketenagakerjaan RI ke Jepang.

#### 3.4.1. SEMINAR “BEST PRACTICE SEMINAR OF ASEAN MRA-TP”

Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menyeragamkan standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata dengan menerapkan *The ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP)*. Terkait hal ini, digelar seminar “Best Practice Seminar of ASEAN MRA-TP” yang berlangsung di Hotel Courtyard Marriott Bandung, Kamis (17/10/2019) lalu.

Di dalamnya menampilkan narasumber dari Indonesia, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos.. Para pembicara menyampaikan “*best practice*” dalam menerapkan ASEAN MRA-TP sebagai pengakuan bersama negara anggota ASEAN dalam menerapkan standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata.

#### 3.4.2. PENERAPAN ASEAN GIUDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATIONS SYSTEMS WITHIN ASEAN ECONOMIES (AGP2).

BNSP baru saja melaksanakan kegiatan bertajuk *Coordination Meeting on ASEAN Guiding Principles Phase 2 Project (AGP2)* yang berlangsung dari tanggal 22 – 23 Juli 2019 di kantor BNSP. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proyek “*Strengthening the Quality Assurance and Competency Certification Systems Application of ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition Of Competency Certification Systems Within ASEAN ECONOMIES*”, atau bisa juga diartikan sebagai prinsip-prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi.

Ini merupakan proyek yang direncanakan dalam Program Kerja Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN 2010-2015 dan dikembangkan oleh Pertemuan Para Pejabat Senior Kementerian Tenaga Kerja ASEAN (SLOM).

Dalam proyek AGP 2, Indonesia ditunjuk untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan, dan BNSP diproyeksikan sebagai Pimpinan Proyek, berkolaborasi dengan *International Organization for Migration (IOM)* dan pendanaan dari The Japan ASEAN Integration FUND (JAIF). Dihadiri oleh Ketua BNSP, Komisioner BNSP, *International Consultant, Institutional Expert, Local Consultant, IOM, Sekretariat BNSP dan Stakeholder*

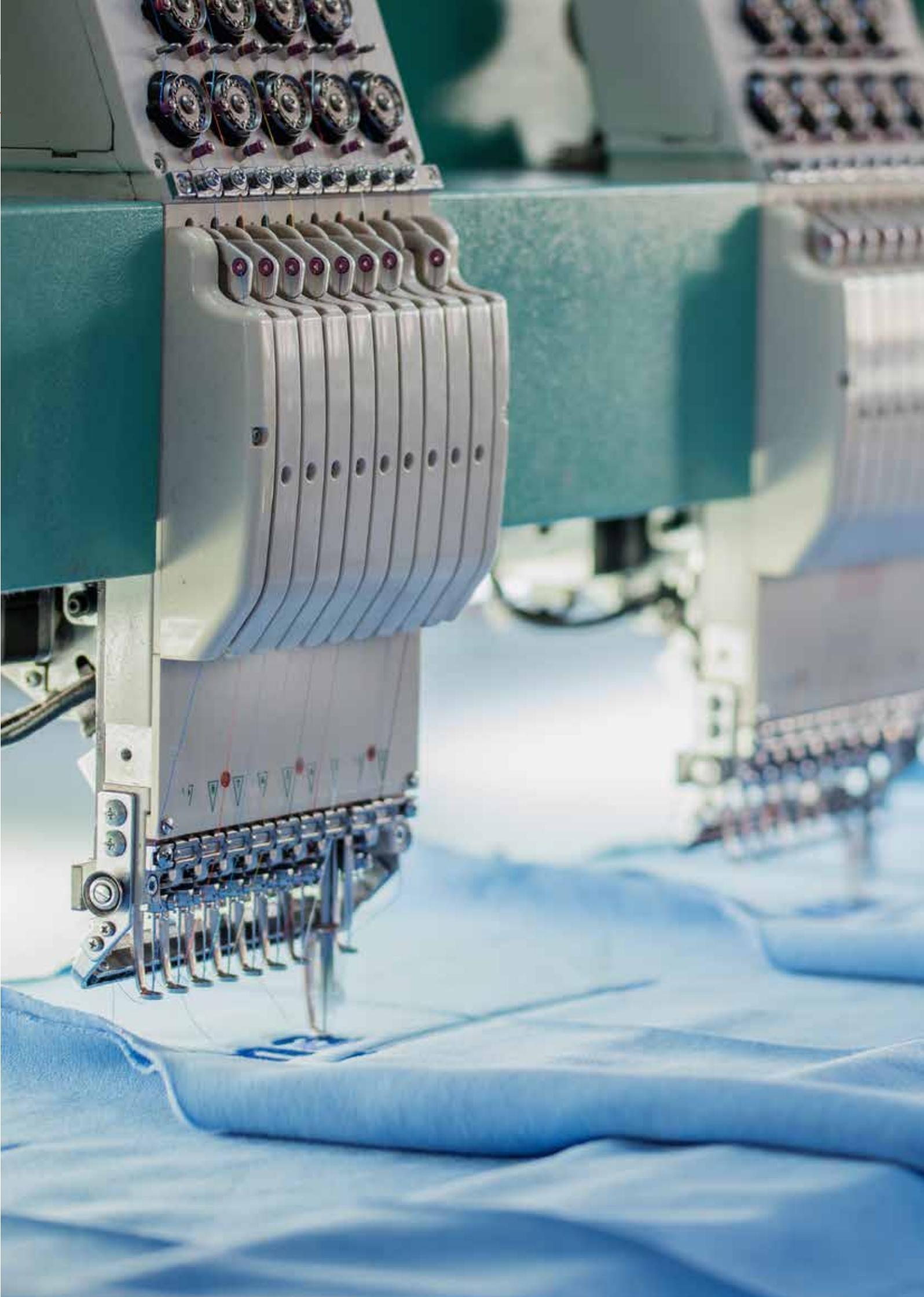
BNSP menyelenggarakan lokakarya peluncuran proyek *Trilateral Meeting 3 Negara*, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina guna memperkuat jaminan kualitas dan sistem sertifikasi kompetensi melalui penerapan *ASEAN Guiding Principles* untuk jaminan kualitas dan pengakuan sistem sertifikasi kompetensi di dalam perekonomian ASEAN.

Kegiatan ini berlangsung di hotel Aryadhuta Jakarta dari tanggal 2-3 Des 2019, yang dihadiri oleh delegasi dr 3 Negara, Ketua dan Anggota, serta Sekretariat BNSP.

*Project Strengthening the Quality Assurance and Competency Certification System through the Application of ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certifications Systems within ASEAN Economies*

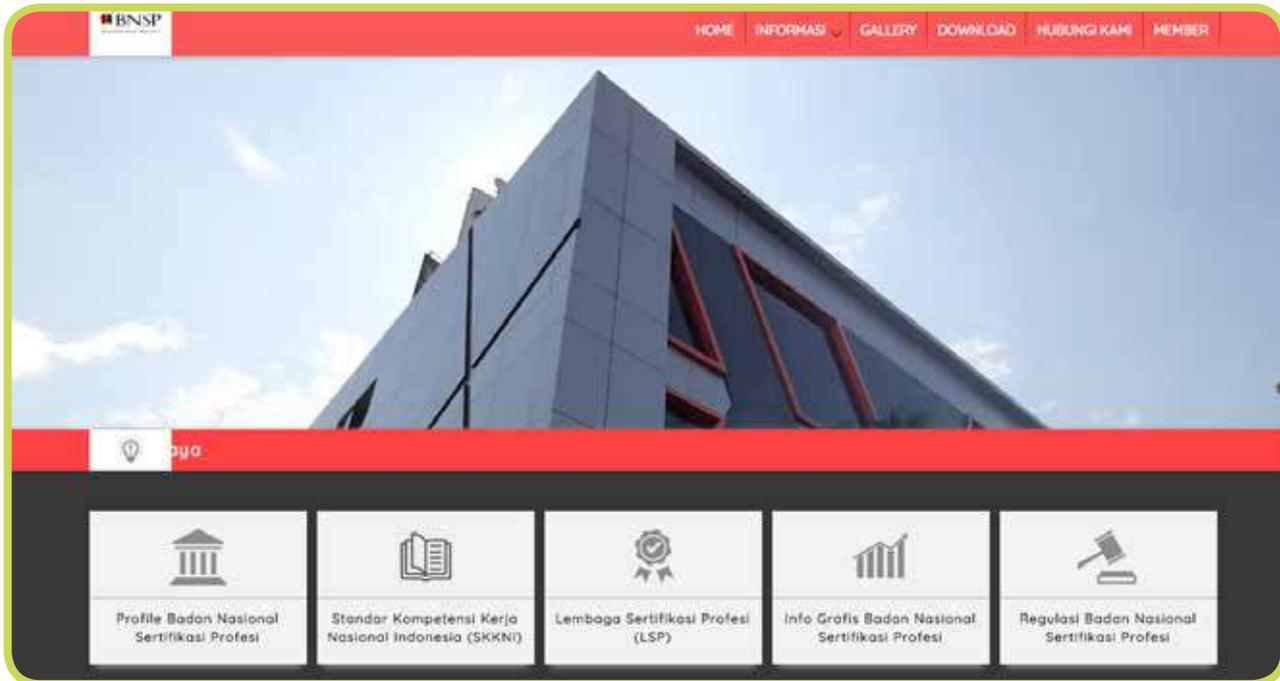








## 3.5 KINERJA BAGIAN DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI



### 3.5.1 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Selama tahun 2019 BNSP mengembangkan sistem informasi berdasarkan masterplan yang sudah dibuat sebelumnya. Ada beberapa layanan yang dikembangkan, antara lain:

#### 1. Pengembangan Sistem Informasi Lisensi

- Pendaftaran dan pengajuan lisensi LSP baru
- Pengajuan perpanjangan lisensi LSP
- Pengajuan penambahan ruang lingkup
- Pengajuan verifikasi skema
- Evaluasi penggunaan skema

#### 2. Pengembangan Sistem Informasi Asesor

- Pengajuan pelatihan asesor oleh LSP
- Sistem pendaftaran calon peserta pelatihan asesor
- Pengajuan RCC Asesor
- Penugasan master asesor sebagai pengajar
- Penugasan master asesor untuk proses asesmen

#### 3. Pengembangan Sistem E-office

- Sistem berbasis *web* dan *mobile*
- Pencatatan surat masuk dan surat keluar
- Manajemen disposisi surat menyurat

#### 4. Profil LSP

- Update sistem profil pemegang sertifikat
- Update sistem profil dan verifikasi asesor dan master asesor
- Update sistem verifikasi TUK
- Update sistem verifikasi SKEMA
- Migrasi data pemegang sertifikat berdasarkan kompilasi data

#### 5. Sistem Pengajuan Blangko

- Modul laporan bulanan, triwulan dan tahunan
- Modul histori pengajuan blanko
- Rekapitulasi dan statistik pengajuan blanko
- Pembuatan nomor blanko otomatis
- Integrasi dan validasi data pemegang sertifikat dengan SISNAKER
- Sistem pengecekan sertifikat secara *online*



## 3.5 KINERJA BAGIAN DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**3.5.2 PROMOSI****1. BILLBOARD DAN VIDEOTRON**

Ada beberapa kegiatan promosi dilakukan sepanjang tahun 2019. Yang pertama adalah pemasangan *billboard* dan *videotron* di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari Medan hingga Jayapura.

No	Lokasi
1	Medan
2	Bali
3	NTB
4	NTT
5	Kendari
6	Samarinda
7	Ambon
8	Jayapura
9	Jakarta
10	Palembang
11	Bandung
11	Bekasi
12	Semarang
13	Bogor
14	Yogyakarta
15	Surabaya
17	Makasar

**2. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT**

Iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di berbagai media massa, seperti TV nasional dan radio. Untuk TV nasional, ILM tayang di Metro TV, TV One, MNC TV, Arema TV, PJTV, Simpang TV, dan RCTI. Sedangkan untuk radio, ILM tayang di Elshinta, Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengenalkan sertifikasi kepada masyarakat luas.

Selain itu, BNSP juga mengadakan dialog interaktif di salah satu stasiun TV swasta tanah air, iNews TV dalam program 'Speak After Lunch'.



### 3.5 KINERJA BAGIAN DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### 3.5.3 PAMERAN

Kegiatan pameran juga bertujuan untuk mengenalkan sertifikasi profesi ke masyarakat. Hanya saja kegiatan ini dilaksanakan pada acara job fair. Tim BNSP menyasar pencari kerja dan memaparkan manfaat apa saja yang didapatkan oleh para pencari kerja ketika mereka sudah tersertifikasi.

No	Lokasi
1	Jakarta
2	Medan
3	Yogyakarta
4	Palembang





3.5 KINERJA BAGIAN DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI



Makro    Bursa Finansial    Sektor Rill    Indeks

## BI, Kemnaker dan BNSP Perkuat Kompetensi SDM Sistem Pembayaran

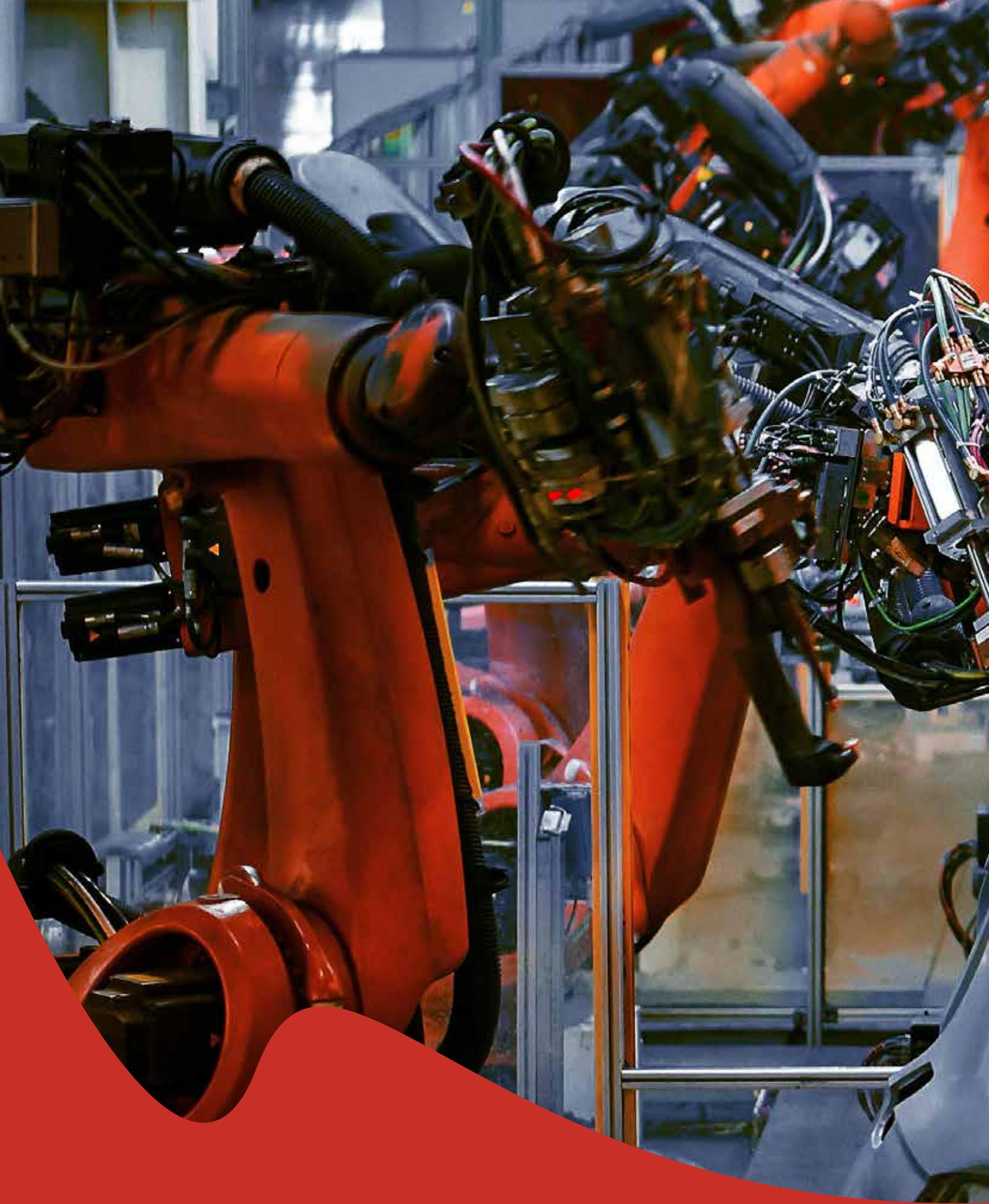
**Rina Anggraeni**  
Selasa, 10 Maret 2020 - 00:30 WIB

BI, Kemnaker dan BNSP Perkuat Kompetensi SDM Sistem Pembayaran

**TERPOPULER**

- 1 Trans Sumatera Tidak Layak Finansial, namun Sangat Dibutuhkan
- 2 Mantan Menkeu Sebut, Ada Tiga Bisnis yang Terancam Tutup
- 3 Mau Selamat dari Krisis, Pengembang Properti Baiknya Jual Rumah Dibawah Rp1 M
- 4 Bukan Basa-Basi, 50 Investor Sudah Masuk Kawasan Industri
- 5 Chatib Basri Sebut Indonesia Tidak Punya Cukup Uang untuk Bisa Terapkan Lockdown

**BERITA TERKINI**





# BAB 4

## **PERAN BNSP DALAM SEKTOR STRATEGIS NASIONAL**



## 4.1. PERAN BNSP DALAM ISU STRATEGIS KHUSUSNYA PMI



Pemerintah telah menetapkan 6 sektor prioritas salah satunya pekerja migran, yang sesuai amanat Undang Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Maka Pemerintah berkepentingan untuk mempersiapkan CPMI secara baik meliputi aspek kompetensi teknis, administrasi dan sosial budaya serta pemahaman atas ketentuan perundangan negara penempatan.

Permenaker 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia pasal 9 ayat 3 bahwa dokumen persyaratan pekerja migran salah satunya adalah sertifikat kompetensi kerja. Dari aspek Kompetensi Teknis CPMI merupakan Tugas Fungsi BNSP dimana salah satunya menyiapkan data informasi terkait sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja melalui Uji kompetensi oleh LSP yang berlisensi

dari BNSP. BNSP yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola program sertifikasi kompetensi profesi di seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan sistem informasi yang dapat mempermudah penyebaran informasi, dokumentasi kegiatan, pengolahan data hingga pelaporan yang dapat mendukung pengambilan keputusan stratejik. Saat ini sudah ada sistem informasi namun belum memenuhi kebutuhan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan stratejik.

Di sektor PMI ini sudah memiliki 14 LSP yang semuanya merupakan LSP P3 atau LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri dibidang PMI. Dari sejumlah LSP tersebut telah melakukan sertifikasi kompetensi dengan menggunakan 18 jenis skema sertifikasi.

### PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibidang pariwisata BNSP menyelenggarakan pelatihan Asesor Kompetensi di 2 (dua) lokasi yaitu:

Pelatihan Asesor Kompetensi	Lokasi	Peserta Askom
LSP PD Nusantara	Nusa Tenggara Barat	20 Orang
LSP Klining Service	Nusa Tenggara Timur	20 Orang



## 4.2. PERAN BNSP DI SEKTOR PARIWISATA

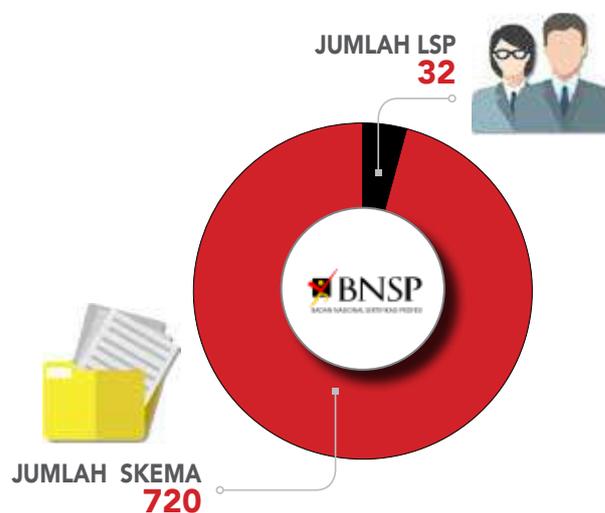


Sumber daya manusia di sektor Pariwisata telah banyak dikembangkan melalui sertifikasi kompetensi yang telah dilakukan oleh LSP di bidang Pariwisata. Dari data yang ada BNSP telah memberikan lisensi untuk 32 LSP dengan dengan jumlah skema sertifikasi yang sangat lengkap di bidang Pariwisata yaitu ada 720 skema sertifikasi. Jenis LSP Pariwisata sebagian besar dari jenis LSP pihak ke 3 dan LSP P1 SMK atau Vokasi atau Perguruan Tinggi.

Selain LSP dan skema sertifikasi yang terbanyak dibanding sektor lain, Asesor Kompetensi dan Master Asesor nya juga yang paling banyak.

Pengembangan LSP dan SDM di bidang Pariwisata inipun sudah hampir menyebar diseluruh provinsi mengikuti sentra-sentra Pariwisata yang ada di Negeri ini.

Di bidang Pariwisata juga telah banyak dilakukan harmonisasi dan pengakuan di tingkat nasional dan internasional, antara lain melakukan *trilateral meeting* 1 dan 2 dengan Malaysia dan Filipina untuk mempelajari substansi pedoman AGP dan BNSP memutuskan untuk menjadi *piloting occupation* di sektor Pariwisata, dimana hasil dari evaluasi masing-masing negara dapat dijadikan sebagai referensi dalam perbaikan sistem sertifikasi di Indonesia.



(\*Data ini berdasarkan search di website dengan keyword 'Pariwisata')

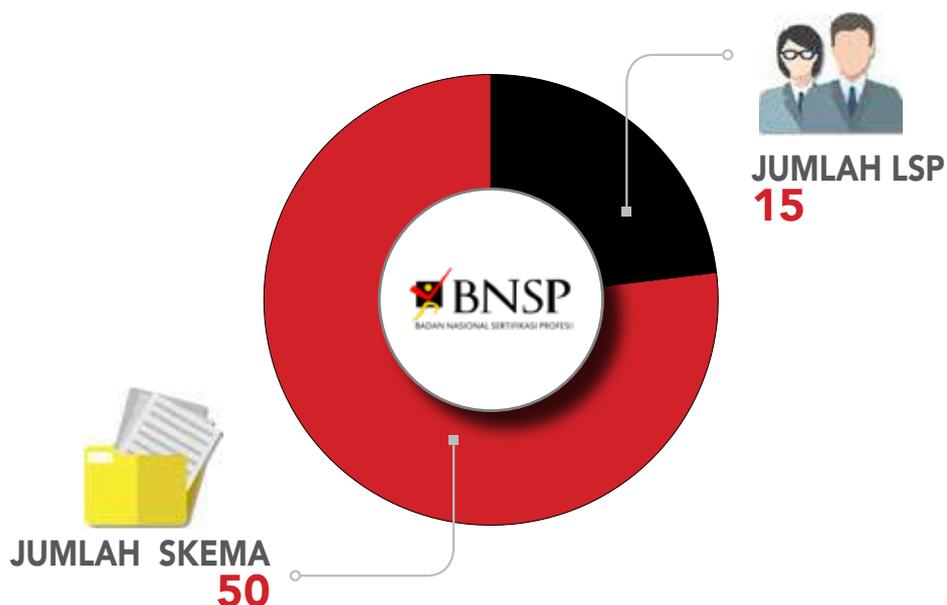


### 4.3. PERAN BNSP DI SEKTOR KESEHATAN



Sertifikasi kompetensi di sektor kesehatan telah mengalami perkembangan yang membaik, dan telah terjadi harmonisasi baik dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga dari para praktisi di bidang Kesehatan. Hingga saat ini telah ada 15 LSP di bidang kesehatan dengan 50 jenis skema sertifikasi. Adapun jenis LSP bidang kesehatan hampir merata dari jenis LSP pihak ke 1 (SMK dan Perguruan Tinggi) juga dari LSP P2 dan P3.

Harmonisasi khusus telah dilakukan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 2019 dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dokter yang dilaksanakan oleh Kolegium Kedokteran. Langkah ini masih dilanjutkan pada tahun 2020 dan masih dilakukan pertemuan-pertemuan dalam menyamakan persepsi tentang sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

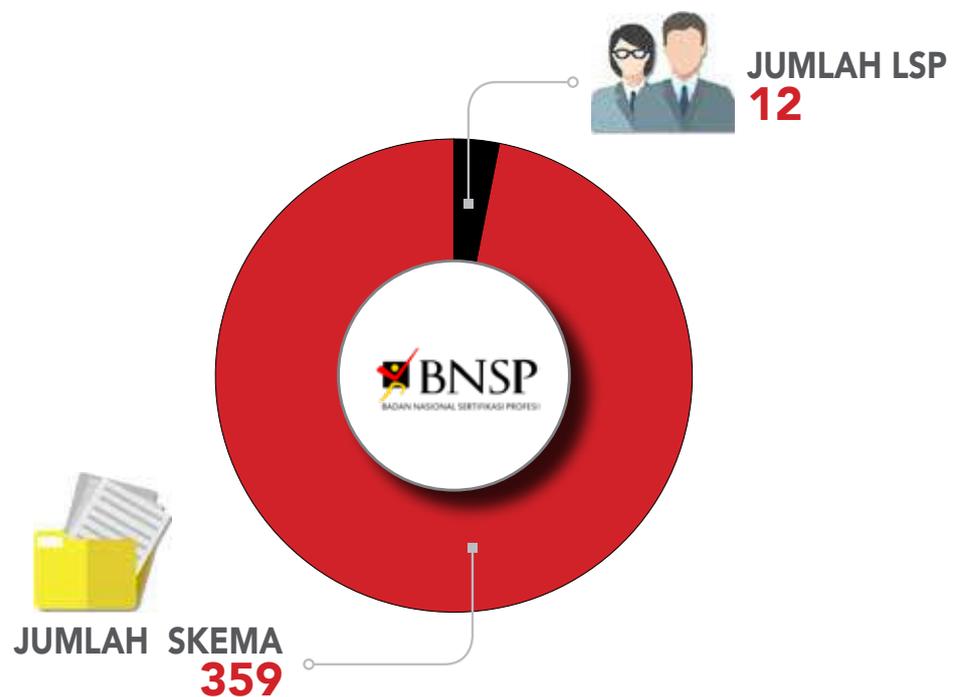




#### 4.4. PERAN BNSP DI SEKTOR PERTANIAN



BNSP telah memberikan lisensi pada 12 LSP di bidang pertanian dengan 359 jenis skema sertifikasi yang saat ini diperlukan oleh sumber daya manusia di bidang Pertanian. Jenis LSP bidang Pertanian kebanyakan dari LSP pihak 1 yaitu SMK dan Perguruan Tinggi, walau ada yang dari jenis P2 dan P3. Jumlah dan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang Pertanian ini tentunya terus ditingkatkan dengan memberikan lisensi kepada LSP di beberapa daerah sentra Pertanian .

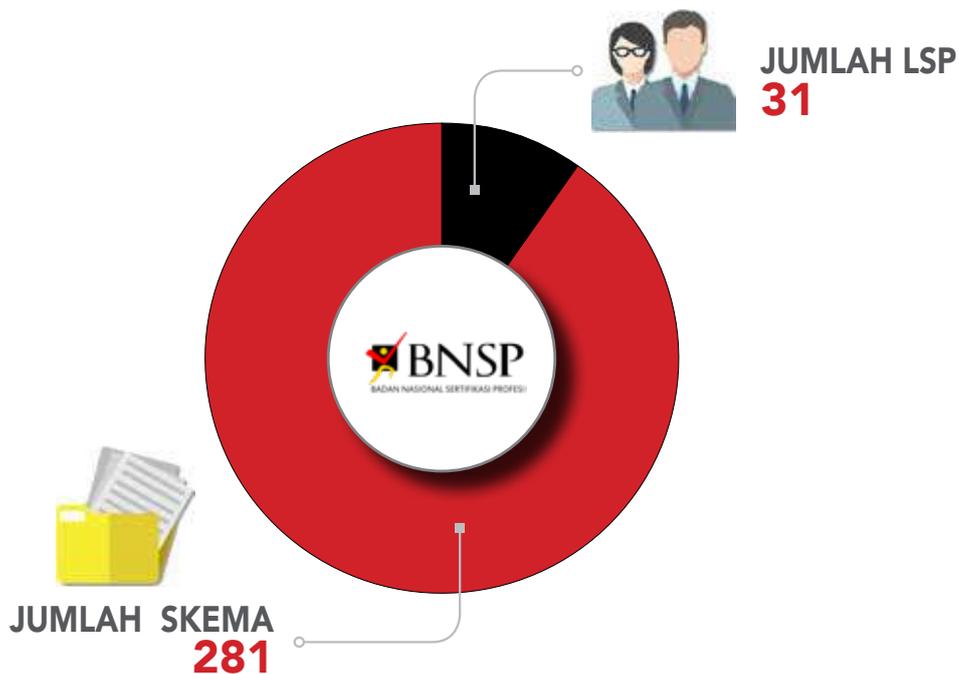




## 4.5. PERAN BNSP DI SEKTOR TIK



Sertifikasi Kompetensi di sektor TIK sangat dibutuhkan oleh para lulusan dan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bidang TIK. Oleh karenanya LSP yang ada di bidang ini sangat berkembang ( 31 LSP dengan 281 jenis skema kompetensi di bidang TIK). LSP TIK juga terdiri dari LSP P1 SMK , Vokasi dan Perguruan Tinggi, LSP P2 yang ada di lembaga atau organisasi dan juga P3 yang didirikan oleh asosiasi di bidang TIK. LSP di bidang TIK dapat mengembangkan skema sertifikasinya sesuai dengan Peta Okupasi yang sudah dibuat oleh sektornya.









**HARMONISASI SERTA  
PENGAKUAN NASIONAL  
DAN INTERNASIONAL**



## BAB.5.0. HARMONISASI DALAM RANGKA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL



Di tingkat nasional BNSP telah terjalin harmonisasi antar asosiasi industri, asosiasi profesi, kementerian dan lembaga sedangkan di tingkat Internasional BNSP sebagai lembaga sertifikasi Indonesia membuat pengembangan kerjasama antar negara dalam rangka pengakuan sistem sertifikasi kompetensi. Atau secara singkat dapat dilihat pada tabel dibawah, mengenai pengembangan kerjasama dalam rangka saling pengakuan sistem sertifikasi kompetensi tahun 2019.

### 5.1. HARMONISASI DENGAN IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)

Sehubungan dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dokter, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah dilaksanakan oleh Kolegium Kedokteran, serta perkembangan di tingkat nasional dan internasional saat ini, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk penguatan tata kelola sertifikasi kompetensi Dokter menuju tata kelola yang direkognisi secara nasional dan internasional.

BNSP mengundang para stakeholder untuk hadir dalam acara yang mengusung tema "Harmonisasi Tata Kelola Sertifikasi Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi

: "*Lessons Learnt*" yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Hari Jum'at, 29 November 2019.

Kegiatan Harmonisasi ini bertujuan untuk saling memahami sistem sertifikasi yang dilaksanakan oleh Kolegium Kedokteran dan BNSP, yang diharapkan akan membawa persamaan persepsi dan dapat saling mengisi sehingga sistem sertifikasi nasional semakin dapat diimplementasikan di semua sektor. Rekomendasi dari kegiatan harmonisasi ini adalah disepakati akan ada pertemuan FGD untuk membahas hal hal teknis dalam upaya harmonisasi sistem sertifikasi profesi.

Peserta acara ini adalah anggota IDI dan Kolegium Kedokteran, dari unsur Kementerian Tenaga Kerja cq Ditjen Binalattas dan BNSP.



## BAB.5.0. HARMONISASI DALAM RANGKA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

### 5.2. HARMONISASI SERTIFIKASI DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI/POLITEKNIK

BNSP melaksanakan harmonisasi dengan LSP Pihak 1 Politeknik Negeri dan dengan Sektor Pembinaanya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dihadiri juga Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (KKNi), dengan tujuan agar pelaksanaan sertifikasi di LSP Pihak 1 Politeknik semakin handal dan diakui semua *stakeholder*. Harmonisasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman tentang pelaksanaan sertifikasi dan skema sertifikasi di LSP P1 Politeknik dan keselarasan dengan kurikulum di Politeknik.



Dalam rangka mewujudkan rekognisi terhadap sertifikat kompetensi tenaga kerja Indonesia di pasar kerja luar negeri. BNSP telah menjalin kerjasama dengan lembaga sejenis di berbagai negara se-cara bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral yang telah dijalin BNSP dengan lembaga pemerintah asing antara lain dengan Australia, Filipina, Thailand, Inggris dan Jepang. Sedangkan dengan lembaga swasta luar negeri antara lain dengan OPITO Norwegia untuk bidang profesi disektor pertambangan. Sedangkan untuk kerjasama multilateral yang telah dijalin BNSP adalah dengan Sekretariat ASEAN dan IOM (*International Organization of Migration*) untuk mengembangkan Pedoman Pengakuan Sertifikat Kompetensi.

#### PENGEMBANGAN KERJASAMA DALAM RANGKA SALING PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Harmonisasi Dengan Asosiasi Industri
- Harmonisasi Dengan IDI
- Harmonisasi Dengan LSP P1 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi/Politeknik
- Australia Saling pengakuan Master Asesor agar diakui Internasional
- BNSP Pimpinan Proyek AGP Buku pedoman yang diterjemahkan dalam 6 bahasa
- Chairman ALMM 2019 Kemenaker akan menjadi chairman ALMM 2020
- Proyek APO BNSP membantu membuat SOP standar kompetensi kerja ASEAN
- Pilot Project 3 Negara Indonesia & Filipina sepakat di sektor pariwisata Okupasi MRA-TP



## BAB.5.0. HARMONISASI DALAM RANGKA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL



BNSP mengadakan *workshop* “Indonesia MRA TP (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional)” yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2019.

### 5.3. WORKSHOP MRA

BNSP mengadakan *workshop* “Indonesia MRA TP (*Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional*)” yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh ketua BNSP, bapak Kunjung Masehat. Ada pun tujuan dari *workshop* ini untuk mengakselerasi pengakuan kompetensi tenaga kerja pariwisata di Indonesia dan di Asean. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang standar dan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ASEAN, khususnya tenaga kerja di bidang pariwisata.

Sehingga akan tercipta komitmen *stakeholder* tentang mutu tenaga kerja pariwisata di ASEAN yang dapat membangun destinasi berkualitas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga ASEAN melalui mobilitas tenaga kerjanya.

### 5.4. SKILL DEVELOPMENT FUND (SDF)

BNSP melaksanakan Rapat program dengan ILO, tentang *Skill Development Fund (SDF)* dan usulan BNSP *study banding* terkait dengan Regional Model *Competency Standard (RMCS)* dan *Technical Assistant* untuk program pelatihan dan sertifikasi di kantor BNSP.



Peluncuran proyek Trilateral Meeting 3 Negara di Hotel Aryadhuta Jakarta dari tanggal 2-3 Des 2019



BAB.5.0. HARMONISASI DALAM RANGKA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL



the 50th ASEAN NTOs Meeting and the 35th ASEAN Plus Three NTOs Meetings, Siem Reap, Cambodia 2019.07.11 - 2019.07.12

**PARTICIPATION IN THE 50TH ASEAN NTOS MEETING AND THE 35TH ASEAN PLUS THREE NTOS MEETINGS**

*Participation in the 50th ASEAN NTOs Meeting and the 35th ASEAN Plus Three NTOs Meetings*

1. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Juli 2019, bertempat di Borei Angkor Resort & Spa dan dihadiri oleh Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Anang Sutono, Staf Ahli Bldang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata, sebagai Head of NTO, didampingi oleh Asdep Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Antar Lembaga, Perwakilan Asdep Pengembangan Wisata Budaya, Perwakilan Asdep Industri dan Regulasi Pariwisata, Perwakilan Asdep Strategi dan Komunikasi Pemasaran I, Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan BNSP dan Perwakilan LSP MICE.
2. Rangkaian pertemuan ASEAN NTOs adalah sebagai berikut: *The 50th Meeting of ASEAN NTOs, 10 - 11 Juli 2019; The 35th ASEAN Plus Three NTOs Meeting, 12 Juli 2019; dan The 22nd Meeting of ASEAN-India Tourism Working Group, 12 Juli 2019.* Bapak Anang hadir dalam ketiga pertemuan tsb sebagai Ketua Delegasi R.I. Adapun Asdep Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Hubungan Antar Lembaga hadir sebagai Ketua Delegasi R.I pada *The 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) Meeting, 8 Juli 2019* dan *Special Meeting of ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC), 9 Juli 2019.*

3. Pertemuan dibuka oleh H.E Dr. Thong Khon (*Minister of Tourism of the Kingdom of Cambodia*). Selanjutnya diikuti dengan sambutan dari H.E Mr. Teav Seiha (*Governor of Siem Reap Province and Heads of ASEAN NTOs*), Pengiran Haji Kamalrudxaman bin Pengiran Haji Mohd Ishak (*Permanent Secretary of the Ministry of Industry and Primary Resources of Brunei Darussalam*) yang pada sambutannya menyampaikan apresiasi kepada negara ASEAN yang telah berpartisipasi aktif dari pertemuan *50th Meeting of ASEAN National Tourism Organitions (NTOS) and Related Meeting* ini.
4. Sebanyak 10 negara ASEAN yang tergabung dalam *ASEAN National Tourism Organizations/ASEAN NTOs* sepakat menerapkan enam strategi promosi pariwisata bersama. ASEAN NTOs menyepakati enam strategi pemasaran pariwisata bersama dalam rangka memajukan pariwisata di kawasan Asia Tenggara sebagai ASEAN single destination. Kesepakatan enam strategi pemasaran pariwisata bersama atau *ASEAN Tourism Marketing Startegy*



## BAB.5.0. HARMONISASI DALAM RANGKA PENGAKUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

(ATMS) 2017-2020 tertuang dalam *ATMS Projects in 2019* dan dibahas dalam forum *The 6th ASEAN Tourism Marketing Partnership Working Group (ATMP-WG) Meeting* yang dipimpin Alex M. Macatuno dari Filipina sebagai *lead country* dan dihadiri para delegasi NTOs dari 10 Negara.

manusia khususnya berkaitan dengan sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu. Tujuan dari benchmarking ini adalah untuk saling membagi pengalaman dan pengetahuan tentang kualifikasi dan sistem sertifikasi yg ada di masing-masing negara. Turut hadir juga dalam kunjungan ini para pejabat dari lingkungan Sekretariat BNSP dan perwakilan dari Ditjen. Binalattas.



*The sixth ASEAN Qualifications Reference Framework (NQF) Phase IV Workshop* tanggal 20 s.d 24 Mei 2019 di Luang Prabang Lao PDR Development Fund (SDF) dan usulan BNSP *study banding* terkait dengan Regional Model Competency Standard (RMCS) dan Technical Assistant untuk program pelatihan dan sertifikasi di kantor BNSP.

### 5.6. SIXTH ASEAN QUALIFICATIONS REFERENCE FRAMEWORK (NQF)

Menghadiri the sixth *ASEAN Qualifications Reference Framework (NQF) Phase IV Workshop* tanggal 20 s.d 24 Mei 2019 di Luang Prabang Lao PDR

### 5.7. KUNJUNGAN KE WELLINGTON, NEW ZEALAND DALAM RANGKA BENCHMARKING DENGAN NZ QUALIFICATION AUTHORITY DAN VICTORIA UNIVERSITY

Anggota Komisioner BNSP yang diketuai oleh Wakil Ketua sebagai *Lead Delegation* melakukan kunjungan ke Wellington, New Zealand dalam rangka *benchmarking* dengan *NZ Qualification Authority* dan *Victoria University*. Sesampainya disana, para anggota komisioner disambut oleh bapak Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia untuk New Zealand.

Diskusi bersama *Victoria University Wellington*, Kementerian Tenaga Kerja Selandia Baru dan *NZQA (New Zealand Qualifications Authority)* membahas tentang sumber daya

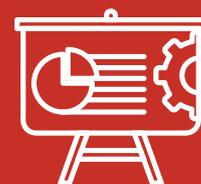


5 Desember 2019, Diskusi bersama *Victoria University Wellington*, Kementerian Tenaga Kerja Selandia Baru dan *NZQA (New Zealand Qualifications Authority)*









# DUKUNGAN ANGGARAN BNSP 2019 & 2020

# BAB 6



## 6.1 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN APBN BNSP TAHUN 2019



### ANGGARAN 2019

**RP.**  
**189.589.783.000**



### REALISASI

**95,38%**

**RP.**  
**180.823.467.618**





## 6.2 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN APBN BNSP TAHUN 2020



Realisasi per- 26 Oktober 2020





# PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI

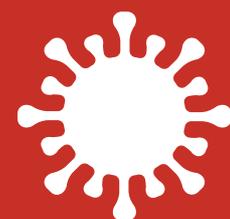
## LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

### OLEH BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KANTOR PUSAT LSP JAWA BARU



  
**KOMISI WITNESI (WITNESS)**  
**PROFESI (LSP) JUSTITIA**  
SERTIFIKASI PROFESI (PNSP)  
ABTU, 27 JUNI 2020



**BNSP DI MASA  
PANDEMI COVID-19**

**BAB 7**



## 7.1. KINERJA DI BIDANG PENJAMINAN MUTU



Sebagai bidang yang memiliki fungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu dan Kerjasama dalam upaya harmonisasi sistem sertifikasi serta pengakuan sertifikasi di lingkup nasional maupun internasional nasional, pada tahun 2020 capaian kinerja pada bidang Penjaminan mutu meliputi:

### MENYELESAIKAN PANDUAN MUTU

Manual Mutu atau Pedoman Mutu dibuat dengan menginterpretasikan klausul-klausul ISO 9001:2008 yang disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan oleh BNSP. Manual Mutu dibuat sebagai pedoman penerapan ISO 9001 : 2008 di BNSP dan LSP.

Panduan mutu ini berisi prinsip, protokol dan persyaratan sistem jaminan mutu BNSP sebagai otoritas sertifikasi kompetensi profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, di tengah kondisi Covid-19, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terus melakukan inovasi agar program dan pelayanan sertifikasi kompetensi terus dapat berjalan yang tentu saja menyesuaikan pada kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sebelumnya BNSP telah menerbitkan SE 011/BNSP/IV/2020 tentang upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dalam melaksanakan pelayanan, SE tersebut dimaksudkan

agar pelayanan sertifikasi kompetensi tetap berjalan dan memberi ruang inovasi / pengembangan sistem sertifikasi diantaranya adalah pembuatan panduan mutu, KSWP dan sertifikasi kompetensi jarak jauh.

Bagi BNSP, menjalani aktivitas dalam tatanan new normal atau normal baru ditangkap dengan semangat baru, harapan baru, karena dengan begitu kita bisa lebih optimal. Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan keadaan ini, sehingga bisa berinovasi sebagai bentuk kemampuan adaptasi yang mencerminkan seberapa kuat kita mampu mengembangkan pelayanan ditengah pandemi covid-19. Kebijakan tersebut perlu dibuat agar secara teknis pelaksanaan layanan mempunyai panduan yang terukur, telusur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelayanan BNSP tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan penanganan dan pengendalian covid-19 dan inovasi pelayanan sertifikasi kompetensi tidak kehilangan prinsip utamanya, yaitu penjaminan mutu.

Untuk menuju BNSP yang kredibel dan diakui Sistem Jaminan Mutu Manajemen Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional nya, maka panduan mutu ini juga mengadaptasi *ASEAN Qualification Recognition Frameworks dan ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems, 2016*.



## 7.1. KINERJA DI BIDANG PENJAMINAN MUTU

**MENYELESAIKAN PERATURAN BNSP TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)**

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merespon disahkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan mengesahkan Peraturan BNSP Nomor 01 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Peraturan BNSP Nomor 01 Tahun 2020 ini terdiri dari 10 Pasal. KSWP BNSP dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi pada BNSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Maka dari itu BNSP mendukung penuh Stranas PK dan menilai perlu dilakukan aksi pencegahan korupsi dalam pemberian layanan publik di internal BNSP, korupsi merupakan tindak kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan berdampak buruk pada kehidupan sosial maupun ekonomi. Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah berupaya keras menghentikan laju praktik korupsi, demikian juga dilakukan oleh BNSP. Stranas PK memiliki 11 aksi dan 27 sub aksi pencegahan korupsi, dengan berfokus pada 3 sektor strategis yang dinilai paling banyak indikasi korupsinya, yaitu perijinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Peraturan BNSP itu dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi.

“BNSP akan memastikan bahwa pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak melalui KSWP untuk pemberian layanan publik tertentu di Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan terus menerus ditingkatkan. Untuk diketahui, Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian dan Lembaga, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Pada rencana aksi Pencegahan Korupsi bulan ke 18, dinyatakan bahwa setiap lembaga yang melakukan pelayanan publik wajib membuat peraturan internal yang berupa konfirmasi status wajib pajak.

Untuk itu BNSP ikut andil dalam Stranas PK, dengan aksi Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non Pajak, pada sub aksi Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), khususnya untuk pelayanan publik yang berupa perpanjangan lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ke BNSP.

**MERESPON PENILAIAN OMBUDSMAN**

Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemda sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Penilaian Ombudsman dilakukan terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten. Survei ini mencakup total 17.717 pelayanan dan 2.366 unit layanan.

Survei kepatuhan ini dilakukan dengan mekanisme pengambilan data survey dengan mengamati secara fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan serentak pada Juli hingga Agustus.

indikator penilaian survei Ombudsman berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus di antaranya kaum disabilitas, ibu menyusui, dan manula. Survei ini menunjukkan sebesar 11,23% atau 63 produk layanan bagi pengguna kebutuhan khusus.

Ombudsman memasukkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam daftar zona merah. Dari indikator-indikator yang ditentukan, BNSP tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka dari itu Ombudsman memasukkan BNSP dalam predikat kepatuhan rendah atau masuk daftar zona merah. Pada penilaian survai yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, BNSP mampu mengubah penilaian Ombudsman yang sebelumnya predikat kepatuhan rendah atau masuk daftar zona merah menjadi zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang. Semoga pada tahun 2020 BNSP juga mampu mengubah penilaian Ombudsman masuk dalam zona hijau atau mendapat predikat kepatuhan tinggi.

**REGULASI YANG DIKELUARKAN PHU YANG MENYANGKUT SEMUA PELAYANAN BNSP DI MASA COVID :**

1. SE. 001/BNSP/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penonaktifan Sementara Sistem Informasi Pelayanan Sertifikasi BNSP
2. SE. 005/BNSP/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC
3. SE. 009/BNSP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona (COVID-19) Dilingkungan



## 7.1. KINERJA DI BIDANG PENJAMINAN MUTU

BNSP Tahun 2020

4. SE. 011/BNSP/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Uji Kompetensi Teknologi Jarak Jauh
5. SE. 337/BNSP/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh (Daring)
6. SE. 022/BNSP/IV/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan dalam Rangka Asesmen Lisensi, Asesmen Relisensi, dan *Witness* dalam Tataan Normal Baru
7. SE. 031/BNSP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dalam Tataan Normal Baru
8. SE. 033/BNSP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Surat Edaran Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Tataan Normal Baru
9. SE. 037/BNSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pelaksanaan RCC dalam Tataan Normal Baru
10. Peraturan BNSP Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Badan nasional Sertifikasi Profesi
11. SE. 071/BNSP/VIII/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Komisiner dan Sekretariat BNSP Dalam Tataan Normal Baru

### MRA

Dalam rangka implementasi MRA untuk 8 (delapan) bidang profesi yang telah disepakati oleh *AMC (ASEAN Member Countries)*, salah satu panduan yang dijadikan referensi untuk saling pengakuan terhadap kualifikasi kompetensi melalui sistem sertifikasi adalah *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems (AGP)*.

Prinsip-prinsip Panduan ASEAN untuk Jaminan Kualitas dan Pengakuan sistem Sertifikasi Kompetensi, atau Prinsip-prinsip Panduan ASEAN, dikembangkan pada tahun 2016 untuk memberikan seperangkat pedoman praktis yang dapat digunakan sebagai alat referensi dalam melakukan pengakuan lintas batas dan jaminan kualitas pekerja.

Dalam menjalankan tanggungjawab legalnya BNSP menjalankan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi sebagai berikut:

#### 1. Tata Kelola

BNSP mendokumentasikan pengaturan tata kelola telah secara jelas mendokumentasikan pengaturan tata kelola yang menetapkan tanggung jawab dan praktik, kebijakan, dan prosedur, yang dilakukan oleh eksekutif

lembaga, untuk memberikan arahan strategis, untuk memastikan tercapainya tujuan, untuk mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

#### 2. Akuntabilitas

BNSP memiliki kerangka hukum atau pelaporan untuk mengevaluasi praktik dan kinerjanya terhadap kriteria yang ditetapkan. BNSP harus memastikan bahwa hasil dari penjaminan mutu serta kegiatan peninjauan mutu dilaporkan kepada publik setidaknya setiap tahun.

#### 3. Transparansi

BNSP memberikan informasi yang akurat dan jelas sehubungan dengan fungsi-fungsi utamanya, termasuk proses, standar, dan kinerja.

#### 4. Independensi

BNSP memiliki mandat, panduan, proses dan praktik yang memastikan independensi dari berbagai elemen sistem penjaminan mutu, penghindaran konflik kepentingan, dan independensi pengambilan keputusan.

#### 5. Keyakinan dan standar

BNSP memiliki proses dan praktik untuk memberi keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa standar-standar (baik masukan maupun keluaran) telah terpenuhi.

#### 6. Perbaikan berkelanjutan

Pendekatan penjaminan mutu BNSP memastikan penggunaan keseimbangan strategi yang meningkatkan penyediaan layanan untuk memenuhi perubahan dan kebutuhan masa depan kelompok pemangku kepentingan.

#### 7. Proporsionalitas

BNSP memiliki penjaminan mutu dan pendekatan peninjauan mutu yang sesuai untuk tujuan dan mencerminkan konteks dan keragaman *ASEAN MEMBER STATES, ASIA PACIFIC, EUROPE AND MIDDLE EAST*.

#### 8. Fleksibilitas layanan

BNSP memastikan bahwa protokol sudah ada secara nasional untuk memfasilitasi layanan penilaian atau proses pengakuan untuk pelamar nasional atau internasional.

#### 9. Kolaborasi

BNSP berkolaborasi dengan badan yang kompeten lainnya, secara nasional dan internasional, untuk menjamin terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### TANGGUNG JAWAB PENJAMINAN MUTU SERTIFIKASI

Bidang jaminan mutu, perencanaan, kerja sama, hukum, dan umum menyelenggarakan koordinasi, pengawasan, dan/atau evaluasi program dan kegiatan dalam hal:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penjaminan mutu sistem sertifikasi kompetensi kerja;



## 7.1. KINERJA DI BIDANG PENJAMINAN MUTU

- c. pelaksanaan advokasi;
- d. perencanaan program dan anggaran;
- e. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antarlembaga, baik nasional maupun internasional;
- f. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi profesi; dan
- g. pelaporan kinerja.



21 Februari 2020 di ruang rapat Lt. 3 BNSP *Public Private Joint Committee Meeting Skills Evaluation System Promotion Program 2020*

### **PUBLIC PRIVATE JOINT COMMITTEE MEETING SKILLS EVALUATION SYSTEM PROMOTION PROGRAM**

BNSP mengadakan acara “*Public Private Joint Committee Meeting Skills Evaluation System Promotion Program 2020*” pada hari Jum’at, 21 Februari 2020 di ruang rapat Lt. 3 BNSP. Guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, maka prioritas pembangunan pemerintah tahun 2020 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan prioritas tersebut, maka semua target yang terkait dengan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi memperoleh peningkatan yang cukup signifikan. *Public Private Joint Committee Meeting, Skills Evaluation System Promotion Program* merupakan bukti komitmen dan kerjasama Indonesia dengan Jepang, Industri, serta seluruh stakeholder tentang betapa pentingnya sertifikasi kompetensi tenaga kerja, terutama di Industri logam mesin. Pertemuan ini membahas harmonisasi tentang mapping penyetaraan antara level kualifikasi Jepang dengan level kualifikasi Indonesia, serta paket okupasi, sehingga sertifikat yang dikeluarkan BNSP maupun yang dikeluarkan Jepang memiliki kesetaraan. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Indonesia dan sektor bisa lebih sadar terhadap sistem sertifikasi nasional sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Dari pihak Jepang, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jepang, *Technical Advisor* Sekretariat SESPP, serta beberapa perusahaan. Sedangkan dari Indonesia dihadiri oleh Ketua BNSP, Komisioner BNSP, Plt Direktur Stankomlatker Kementerian Ketenagakerjaan, dan beberapa perwakilan LSP.

Penerapan *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certifications Systems within ASEAN Economies (AGP2)*.

Pada tanggal 10 – 11 Februari 2020 dilaksanakan *Trilateral Workshop* ke dua di Jakarta, yang seyogyanya dilaksanakan di Filipina tetapi karena di negara tersebut terjadi force majeure (bencana alam meletusnya gunung berapi Taal) maka Filipina menyarankan dilakukan di Indonesia. Pada pertemuan ini diputuskan sector pariwisata dan okupasi *Waiter level II ASEAN Competency Standard Referencing (ACSR)*, *Housekeeping level II* dan *Pattiserie level II* yang dijadikan sebagai okupasi pada *Project Strengthening the Quality Assurance and Competency Certification System through the Application of ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certifications Systems within ASEAN Economies*.

Hal lain yang dibahas pada *Trilateral workshop* ke dua ini: pembahasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi di masing masing negara untuk memastikan proses sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan yang dinyatakan pada *benchmarking report* masing masing negara: Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Selain itu juga setiap negara memaparkan draft Laporan *Benchmarking* ketiga negara dan diberi komentar tertulis oleh setiap negara untuk klarifikasi dan pemenuhan bukti dari pernyataan yang tertera di laporan benchmarking.

*Final report* diendors oleh SLOAM dari masing masing negara dan disampaikan ke ASEAN SECRETARIAT pada tanggal 19 Juni 2020.

Dengan adanya pandemic CORONA Virus 19 menyebabkan rencana pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi di Indonesia, Malaysia dan Filipina mengalami perubahan, dan pada *virtual meeting* tanggal 19 Mei 2020 untuk membahas TOR *Monitoring* dan Evaluasi diputuskan dilakukan secara *online* dan hanya memaparkan proses pelaksanaan sertifikasi dan *evidence* nya oleh Lembaga Pelaksana Sertifikasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara *virtual* telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Juli 2020 untuk sistem sertifikasi kompetensi Indonesia, dan untuk Malaysia akan dilaksanakan tanggal 13 – 14 Agustus 2020, dan Philipina tanggal 5-6 Agustus 2020.



## 7.2. KINERJA LISENSI DI MASA PANDEMI COVID 19

Sesuai Surat Edaran BNSP Nomor SE.011/BNSP/IV/2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada poin D nomor 2. Pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dibolehkan dengan ketentuan :

1. LSP menjamin teknologi / sistem yang digunakan dapat telusur terhadap bukti kompetensi yang dimiliki oleh Asesi, terjamin kerahasiaan, keamanan dan prinsip asesmen serta aturan bukti yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman asesmen sebagai penjaminan mutu sertifikasi kompetensi.
2. LSP menetapkan persyaratan teknis TUK Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dan menjamin persyaratan teknis skema sertifikasi tersebut tersedia dan dapat digunakan.
3. LSP mengajukan permohonan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh ke BNSP dengan melampirkan SOP Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dan penjelasan teknologi informasi atau sistem / aplikasi yang digunakan.
4. LSP menjamin pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh dengan tetap menjalankan prinsip pembatasan sosial dan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid 19.

Permohonan persetujuan Asesmen / Uji Kompetensi jarak jauh tersebut (poin 2 c) akan diverifikasi BNSP dan surat persetujuan Asesmen / Uji Kompetensi Jarak Jauh akan diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sampai dengan bulan Juli 2020 LSP yang sudah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan asesmen jarak jauh sebanyak 63 LSP dengan jumlah skema 177.

Data pelayanan lisensi, relisensi, PRL, dalam tatanan normal baru sesuai SE. No.022/BNSP/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan Dalam Rangka Asesmen Lisensi, Asesmen Relisensi, dan Penyaksian Asesmen Kompetensi/Uji Kompetensi (*Witness*) Dalam Tatanan Baru:

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH LSP
1	AASESMEN LISENSI	3
2	RELISENSI	1
3	PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI ( <i>WITNESS</i> ) DAN PENYAKSIAN UJI KOMPETENSI ( <i>WITNESS</i> ) PENAMBAHAN RUANG LINGKUP	5



## 7.3. KINERJA SERTIFIKASI DI MASA PANDEMI COVID 19

### PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM PSKK TATANAN NORMAL BARU

1. Daerah yang boleh melaksanakan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) ditentukan oleh BNSP dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah daerah atau gugus tugas COVID-19 tentang pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. LSP P1 SMK yang dapat melaksanakan Program PSKK, hanya yang sudah berada pada zona hijau. Status zona (merah, kuning dan hijau) dapat dilihat pada *website* :<https://covid19.go.id/peta-risiko>.
3. TUK LSP P1 SMK untuk pelaksanaan Program PSKK yang saat ini masih berada di daerah yang berstatus (merah & kuning) belum dapat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
4. Batas waktu penandatanganan SPK untuk LSP P1 SMK sampai tanggal 24 Juli 2020, apabila sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 TUK untuk Program PSKK masih belum berada di daerah status zona hijau, maka program PSKK dibatalkan.
5. Asesor Kompetensi dan Personil yang ditugaskan oleh LSP untuk melakukan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dalam kondisi sehat dan menyatakan siap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, serta personil melakukan *self assessment* dengan mengisi formulir *Self Assessment* Risiko COVID-19 (Form akan diberikan oleh LSP sebelum pelaksanaan).
6. Asesi yang akan terlibat dalam Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dalam kondisi sehat dan bersedia melakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 dengan mengisi form *self assessment* (Form akan diberikan oleh LSP sebelum pelaksanaan).
7. Asesor Kompetensi, Personil dan Asesi yang terlibat dalam kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) wajib membawa alat tulis sendiri.
8. Mewajibkan kepada semua Asesor Kompetensi, Personil dan Asesi yang terlibat dalam kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) di TUK sudah memahami penerapan protokol kesehatan.
9. LSP memastikan seluruh area dan sarana prasarana yang akan digunakan kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan desinfektan 1 jam sebelum kegiatan dimulai.
10. LSP Menyiapkan personil yang bertugas untuk melakukan pengukuran suhu badan kepada semua orang yang akan memasuki area kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK).
11. Membatasi kehadiran orang lain di area kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) selain Asesor Kompetensi, Personil dan Asesi.

### PELAKSANAAN PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI / RCC DALAM TATANAN NORMAL BARU

1. Membuat Edaran Pelaksanaan Pelatihan Askom/RCC Tatanan Normal Baru di lampiran
2. Pelaksanaan Pelatihan Askom/RCC dalam Tatanan Normal Baru  
Pelaksanaan Pelatihan Askom Anggaran BNSP :

#### PELAKSANAAN PELATIHAN ASKOM ANGGARAN BNSP :

No	Pelatihan Askom	Lokasi Pelaksanaan	Peserta Askom
1	Angkatan I	Jakarta	20 Orang
2	Angkatan II	Jakarta	20 Orang



## 7.3. KINERJA SERTIFIKASI DI MASA PANDEMI COVID 19

## PELAKSANAAN PELATIHAN ASKOM ANGGARAN MANDIRI :

No	Askom	LSP	Peserta
1	Januari	31 LSP	690 Orang
2	Februari	36 LSP	760 Orang
3	Maret	33 LSP	775 Orang
4	Juli	8 LSP	167 Orang
5	Agustus	25 LSP	603 Orang

## PELAKSANAAN PELATIHAN RCC ANGGARAN BNSP :

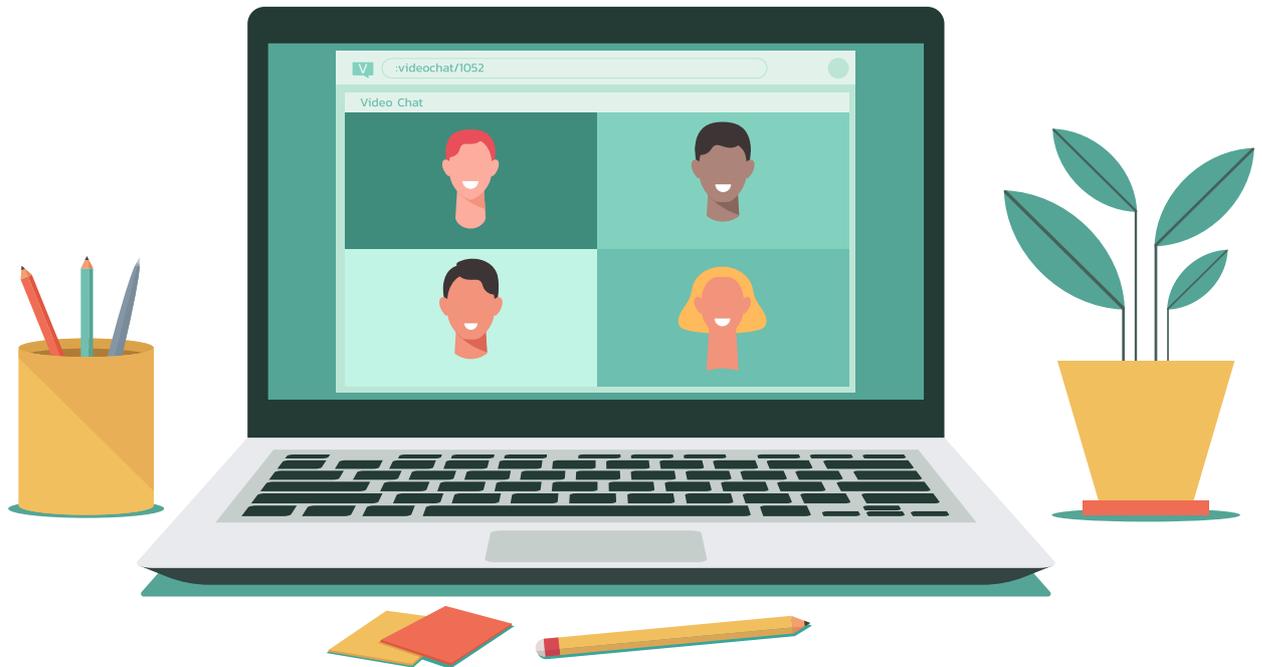
No	RCC	Lokasi Pelaksanaan	Peserta
1	Angkatan I	Kebumen	20 Orang
2	Angkatan II	Malang	20 Orang
3	Angkatan III	Solo	20 Orang
4	Angkatan IV	Purwokerto	20 Orang
5	Angkatan V	Ternate	20 Orang
6	Angkatan VI	Medan	20 Orang
7	Angkatan VII	Mataram	20 Orang
8	Angkatan VIII	Madura	20 Orang
9	Angkatan IX	Semarang	20 Orang
10	Angkatan X	Cirebon	20 Orang
11	Angkatan XI	Jakarta	20 Orang
12	Angkatan XII	Medan	20 Orang
13	Angkatan XIII	Palembang	20 Orang
14	Angkatan XIV	Bekasi	20 Orang
15	Angkatan XV	Surabaya	20 Orang

## PELAKSANAAN PELATIHAN RCC ANGGARAN MANDIRI :

No	RCC	LSP	Peserta
1	Januari	21 LSP	382 Orang
2	Februari	33 LSP	633 Orang
3	Maret	19 LSP	318 Orang
4	Juli	6 LSP	152 Orang
5	Agustus	19 LSP	400 Orang



### 7.3. KINERJA SERTIFIKASI DI MASA PANDEMI COVID 19



#### **PELAKSANAAN WORKSHOP MASTER ASESOR KOMPETENSI MELALUI WEB BINAR/DARING**

*Workshop* Master Asesor Kompetensi diselenggarakan bertujuan untuk menyamakan pemahaman para Master Asesor BNSP mengenai modul pelatihan asesor kompetensi dan modul RCC asesor kompetensi, yang berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan pelatihan serta uji kompetensi. Pelaksanaan *Workshop* Master Asesor Kompetensi saat ini dilaksanakan dengan menggunakan media daring (dengan jaringan) aplikasi *zoom meeting*, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemic saat ini.





# SERTIFIKASI PROFESIMU





# BAB 8

**PENUTUP**



## BAB 8. PENUTUP



Demikian Laporan Kinerja BNSP 2019 – 2020 ini yang telah memaparkan berbagai kegiatan sertifikasi, lisensi, harmonisasi, rekognisi, pengembangan sistem data dan informasi, perancangan *E-Office* dan pengembangan SDM. Harmonisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga telah kami lakukan agar SDM Indonesia memiliki kompetensi-kompetensi baru untuk dapat melompat lebih tinggi lagi dan menjadikan Indonesia unggul melalui sertifikasi kompetensi.

Diharapkan dari adanya Laporan Kinerja BNSP 2019 -2020 ini dapat menjadi suatu referensi dalam upaya mengembangkan dan menguatkan kualitas penjaminan mutu BNSP dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional sehingga dapat melangkah lebih maju lagi ke depan dalam menyambut program pemerintah untuk selalu meningkatkan SDM Indonesia yang unggul.

KETUA BNSP,  
**KUNJUNG MASEHAT**





## LAMPIRAN

### KINERJA LISENSI DI MASA PANDEMI COVID 19 IPENJELASAN AJJ, KRITERIA, JUMLAH LSP, JUMLAH SKEMA

DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
1	PT. PERTAMINA	1	SKEMA SERTIFIKASI <i>LOADING</i> MASTER
		2	SKEMA SERTIFIKASI PETUGAS PENGUKUR TANGKI DAN GAS TESTER
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
		4	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
2	MAJELIS ULAMA INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI PENYELIA HALAL
3	JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER AUDIT INTERNAL KEAMANAN PANGAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGELOLAAN KEAMANAN PANGAN BERBASIS HCCP
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER AUDIT EKSTERNAL KEAMANAN PANGAN
4	INFORMATIKA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGEMBANG <i>WEB</i> PRATAMA
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>PROGRAMMER</i>
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>NETWORK ADMINISTRATOR</i>
5	PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI DAN SAMPAH (LSP LALINSA)	1	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		3	SKEMA SERTIFIKASI PEMANTAUAN DAN ANALISIS PENGOLAHAN LIMBAH B3
6	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ANGGOTA TIM PENYUSUN ANALISIS MENEGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (ATPA)
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KETUA TIM PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KTPA)
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAMBIL CONTOH UJI AIR (PCUA)
7	PAMA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI <i>HEAVY DUMP TRUCK</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI OPERATOR <i>BULLDOZER</i>


**DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP**

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI OPERATOR SEMI <i>DUMP TRAILER</i>
8	PEKERJA DOMESTIK NUSANTARA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>HOUSEKEEPER</i> UNTUK NEGARA PENEMPATAN HONGKONG DAN SINGAPURA
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>HOUSEKEEPER</i> UNTUK NEGARA TUJUAN MALAYSIA DAN BRUNAI DARUSSALAM
9	KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR NASIONAL (LSP PELATINAS)	1	SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI 3 BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN PELATIHAN TATAP MUKA
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGELOLAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
		4	SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI 4 BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
		5	SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI 6 BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
		6	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN PELATIHAN JARAK JAUH
10	PENULIS DAN EDITOR PROFESIONAL	1	SKEMA SERTIFIKASI PENULIS BUKU NONFIKSI
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENYUNTINGAN NASKAH BUKU
		3	SKEMA SERTIFIKASI PENYUNTINGAN SUBSTANTIF
11	PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN (PPM)	1	SKEMA SERTIFIKASI MANAJER RANTAI PASOK
		2	SKEMA SERTIFIKASI MANAJER GUDANG
		3	SKEMA SERTIFIKASI AUDITOR FORENSIK KORPORASI
		4	SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PENGEMBANGAN PRODUK BARU
		5	SKEMA SERTIFIKASI MANAJER LOGISTIK
		6	SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR LOGISTIK
12	MSDM BALIASEAN INTERNATIONAL	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAYANAN ADMINISTRASI SDM
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI HR <i>MANAGER</i> SDM
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI HR <i>SUPERVISOR</i> SDM
13	PERBANKAN	1	SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN LEVEL IV
		2	SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN LEVEL V
		3	SKEMA SERTIFIKASI <i>TREASURY DEALER</i> LEVEL <i>ADVANCE</i>



## LAMPIRAN

### DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
14	GEO MINERAL BATUBARA DAN ENERGI	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP)
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS OPERASIONAL MUDA (POM)
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS OPERASIONAL UTAMA (POU)
15	TIK INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER <i>PRACTICAL OFFICE ADVANCE</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER <i>DATABASE PROGRAMMING</i>
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER <i>GRAPHIC DESIGN</i>
16	LINGKUNGAN HIDUP	1	SKEMA SERTIFIKASI ANGGOTA TIM PENYUSUN AMDAL (ATPA)
		2	SKEMA SERTIFIKASI KETUA TIM PENYUSUN AMDAL (KTPA)
		3	SKEMA SERTIFIKASI AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP (ALH)
17	LINGKUNGAN HIDUP NUSANTARA	1	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH
		3	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
18	LSK K3 ICCOSH	1	SKEMA SERTIFIKASI OPERATOR K3 MIGAS
		2	SKEMA SERTIFIKASI AHLI INVESTASI INSIDEN
		3	SKEMA SERTIFIKASI PETUGAS K3 FASILITAS KESEHATAN
19	LAS	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>WELDING INSPECTOR</i>
20	TRAINER INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN <i>COACHING</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN PROGRAM TATAP MUKA
		3	SKEMA SERTIFIKASI KKN I LEVEL III PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
21	ENERGI	1	SKEMA SERTIFIKASI PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS
		2	SKEMA SERTIFIKASI AUDITOR ENERGI INDUSTRI
		3	SKEMA SERTIFIKASI OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS


**DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP**

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
22	PT. BENEFITA INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
23	FASILITATOR INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN (LSP FIT)	1	SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL III PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERENCANAAN PENYAJIAN MATERI PELATIHAN
24	K3 OSHE NUSANTARA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MUDA
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGANALISA KECELAKAAN KERJA
25	AGEN REAL ESTAT ANDALAN (LSP AREA) INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI BROKER PROPERTI KKNi LEVEL VI
26	PARIWISATA JANA DHARMA INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MARKETING <i>COMMUNICATION SPECIALIST</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>TRAVEL CONSULTANT</i>
27	KOMPUTER	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR MUDA
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR MUDA
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI DESAIN GRAFIS JUNIOR
28	INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN NASIONAL	1	SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL III PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL IV PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PROGRAM PELATIHAN TATAP MUKA
29	UNIVERSITAS PAMULANG	1	SKEMA SERTIFIKASI PEMROGRAM ( <i>PROGRAMMER</i> )
		2	SKEMA SERTIFIKASI TEKNISI AKUNTANSI PRATAMA (LEVEL 3)
		3	SKEMA SERTIFIKASI KKNi KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
30	TELEKOMUNIKASI	1	SKEMA SERTIFIKASI PERENCANA RADIO FREKUENSI
		2	SKEMA SERTIFIKASI PERENCANA <i>CORE</i>



## LAMPIRAN

### DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
31	BINA SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH	1	SKEMA SERTIFIKASI PENANGANAN LIMBAH B3
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		3	SKEMA SERTIFIKASI PEANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
32	MIGAS	1	SKEMA SERTIFIKASI PENGAWAS OPERATOR PRODUKSI
		2	SKEMA SERTIFIKASI OPERATOR PENGAMBIL CONTOH MINYAK BUMI
		3	SKEMA SERTIFIKASI AHLI PENGENDALI PENGEBORAN
33	PT. PEGADAIAN	1	SKEMA SERTIFIKASI PENAKSIRAN BARANG JAMINAN EMAS
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENAKSIRAN BARANG JAMINAN BERLIAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI PENAKSIRAN BARANG JAMINAN ELEKTRONIK, KENDARAAN BERMOTOR DAN LAINNYA
34	KEUANGAN SYARIAH	1	SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN TINGKAT 1
		2	SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN TINGKAT 2
		3	SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN TINGKAT 3
35	LPK MITRA KALYANA SEJAHTERA (LSP LPK MKS)	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO BERKUALIFIKASI (QRMO – <i>QUALIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER</i> )
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PIMPINAN MANAJEMEN RISIKO BERKUALIFIKASI (QCRO – <i>QUALIFIED CHIEF RISK OFFICER</i> )
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PROFESIONAL TATA KELOLA RISIKO BERKUALIFIKASI (QRGP – <i>QUALIFIED RISK GOVERNANCE PROFESSIONAL</i> )
36	TENAGA TEKNIK INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MUDA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS



**DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP**

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
37	BUMA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI (PT. BUMA) OPERATOR ALAT BERAT UNIT <i>BULLDOZER</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI (PT. BUMA) OPERATOR ALAT BERAT UNIT <i>DUMP TRUCK</i>
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI (PT. BUMA) MEKANIK ALAT BERAT UNIT DOZER
38	MSDM PROFEISONAL	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI <i>HUMAN RESOURCES MANAGER</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI <i>HUMAN RESOURCES STAFF</i>
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI <i>RECRUITMENT AND SELECTION STAFF</i>
39	STMIK MATARAM	1	SKEMA SERTIFIKASI <i>LEAD PROGRAMMER</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI <i>NETWORK DESIGNER</i>
40	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (DAIMARU)	1	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
41	ENERGI MANDIRI	1	SKEMA SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA MINERAL DAN BATUBARA
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL MADYA MINERAL DAN BATUBARA
		3	SKEMA SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL UTAMA MINERAL DAN BATUBARA
42	USER PLN	1	SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISI PEKERJAAN SIPIL TRANSMISI/JARINGAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISI PEMASANGAN PERALATAN ELEKTRIKAL TRANSMISI/JARINGAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISI PEMASANGAN MESIN PEMBANGKIT
43	INTALA	1	SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL IV BIDANG METODOLOGI PELATIHAN KERJA SUB BIDANG KEINSTRUKTURAN



## LAMPIRAN

### DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
		2	SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL III BIDANG METODOLOGI PELATIHAN KERJA SUB BIDANG PELATIHAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
44	INSAN RITEL INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENANGANAN TRANSAKSI PENJUALAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENJUALAN PRODUK DAN LAYANAN RITEL
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENERIMAAN BARANG DAGANGAN
45	GEOSPASIAL	1	SKEMA SERTIFIKASI ANALIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
		2	SKEMA SERTIFIKASI TEKNISI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
		3	SKEMA SERTIFIKASI OPERATOR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
46	CLEANING SERVICE NUSANTARA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KLINER JUNIOR
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI SUPERVISOR KLINING SERVIS
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI SUPERVISOR KLINING SERVIS
47	LPK PREINEXUS	1	SKEMA SERTIFIKASI <i>LEAD PROGRAMMER</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI <i>NETWORK DESIGNER</i>
48	LOGISTIK INSAN PRIMA	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>WAREHOUSE SUPERVISOR</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>FREIGHT FORWARDER</i>
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>SUPPLY CHAIN MANAGER</i>
49	PENDIDIKAN INTERNAL AUDIT	1	SKEMA SERTIFIKASI AUDITOR INTERNAL
50	BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (BPPTIK)	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGEMBANG <i>WEB PRATAMA (JUNIOR WEB DEVELOPER)</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI <i>JUNIOR OFFICE OPERATOR</i>



## DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
51	ALAT BERAT INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERAWATAN BERKALA ( <i>PERIODIC SERVICE</i> ) ALAT BERAT <i>SMALL EXCAVATOR</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGOPERASIAN ALAT BERAT <i>FORKLIFT</i>
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PEMINDAHAN BEBAN ( <i>RIGGER</i> )
52	KIMIA INDUSTRI	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR PENGAMBILAN CONTOH AIR
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR PENGAMBILAN CONTOH LIMBAH
53	LPK JUSTITIA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MEMBERIKAN KONSULTASI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MELAKUKAN PERANCANGAN KONTRAK DASAR
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KONSULTAN HUKUM PERTAMBANGAN
54	KELAUTAN	1	SKEMA SERTIFIKASI AHLI PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI TEKNISI PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI PELAKSANA PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
55	PASAR MODAL	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MANAJEMEN RISIKO MADYA
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MANAJEMEN RISIKO UTAMA
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MANAJEMEN RISIKO UTAMA
56	ESDM	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP)
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM)
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MANAJER ENERGI DI INDUSTRI DAN BANGUNAN
57	SEMEN INDONESIA GROUP	1	SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISI PERENCANAAN PEMELIHARAAN



## LAMPIRAN

### DATA LSP YANG MELAKUKAN ASESMEN JARAK JAUH SESUAI SK BNSP

NO	NAMA LSP	NO	NAMA SKEMA SERTIFIKASI
		2	SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBELAJARAN DI TEMPAT KERJA
		3	SKEMA SERTIFIKASI ANALISIS <i>QUALITY CONTROL</i>
58	BROKER PROPERTI INDONESIA	1	SKEMA SERTIFIKASI BROKER PROPERTI SERTIFIKASI KKNi LEVEL VI
59	PEMASARAN	1	SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL AREA KERJA PENJUALAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL AREA KERJA LAYANAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI TENAGA PEMASAR OPERASIONAL AREA KERJA PENGELOLAAN
60	PPSDM MIGAS	1	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR K3
		2	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS K3
		3	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JURU IKAT BEBAN (SIGNALMAN)
61	TATA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN	1	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
		2	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB OPERASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
		3	SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
62	MANAJEMEN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN NUSANTARA	1	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN PEMASARAN
		2	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN KEWIRAUSAHAAN
		3	SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAYANAN PRIMA
63	PERUSAHAAN GAS NEGARA	1	SKEMA SERTIFIKASI OPERATOR PENYAMBUNG PIPA <i>POLYETHYLENE (PE)</i>
		2	SKEMA SERTIFIKASI OPERATOR PENYAMBUNG PIPA GALVANIS
		3	SKEMA SERTIFIKASI PELAKSANA KOMERSIALISASI GAS BUMI

[Data pelayanan lisensi, relisensi, prl, dalam tatanan normal baru]



# LAPORAN KINERJA 2019-2020



▶ Kantor Pusat  
Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan,  
Indonesia 12780

▶ Online  
Email : [admin@bns.go.id](mailto:admin@bns.go.id)

▶ Phone & Fax  
Phone : 021-7992685



[www.bns.go.id](http://www.bns.go.id)